

SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PEMILU DAMAI DAN DEMOKRASI BERMARTABAT :

PERSPEKTIF KRISTEN PROTESTAN





**PEMILU DAMAI
DAN DEMOKRASI BERMARTABAT:
PERSPEKTIF TEOLOGI KRISTEN PROTESTAN**

Penulis :

**Pdt. Hariman A. Pattianakotta, M.Th
dan
Agustina Raplina Samosir, M.Th**

Editor:

Rainy Hutabarat

Koordinator :

Jeirry Sumampau

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Republik Indonesia
Jl. M. H. Thamrin 14
Jakarta Pusat
Indonesia

PENGARAH

Abhan
Mochammad Afifuddin
Ratna Dewi Pettalolo
Rahmat Bagja
Fritz Edward Siregar

PEMBINA

Gunawan Suswantoro

PENANGGUNG JAWAB

Ahmad Khumaidi

KETUA TIM

Feizal Rachman

WAKIL KETUA

Fathul Andi Rizky Harahap
Bugi K. Widiyanto
Erni Kusumastuty

PENELITI

Masykurudin Hafidz
Muhammad Ikhsan
Deitry Aritonang
Muhammad Zaid
Nugroho Noto Susanto
Sarmidi Husna
Pdt. Hariman Pattianakotta
Antonius Beny Wijayanto
Eko Nugroho Rahardjo
I Made Wirayasa
Peter Lesmana

ASISTEN PENELITI

Hanif Vidi Yuwono
Nurdiansyah
Kelfin Roy D. Boseran
Sonta S.
Aji Nugroho
Keke Eskatario
A. Farichin Beka
Asep Saepurrohman
Ike Aprilina
Sudarmin Nurdani
Riedo Adi Saputri

DESAIN & TATA LETAK

Mohd Chalel

Bagaimana Menggunakan Buku ini?

Buku ini tidak bermaksud menyajikan panduan lengkap tentang pemilu damai dan demokrasi bermartabat dari perspektif Kristen. Apa yang disajikan buku ini adalah pengantar untuk memahami hakikat demokrasi, Pemilu, partisipasi –terutama warga gereja sebagai hak dan tanggung jawab untuk mewujudkan pemilu dan demokrasi bermartabat, serta bagaimana memilih pemimpin.

Buku ini memaparkan landasan alkitabiah dan refleksi teologis (Kristen) yang dapat digunakan untuk membantu atau “memantik” warga gereja untuk menemukan dan mengembangkan pemahaman tentang pokok-pokok pikiran seputar partisipasi sebagai hak dan tanggung jawab, pemilu dan demokrasi bermartabat serta memilih pemimpin yang tepat secara pribadi.

Pengguna buku ini, baik pendeta, penatua maupun warga jemaat, dapat mengadaptasi atau mengembangkan bahan-bahan yang tersaji sesuai kebutuhan masing-masing atau memanfaatkan buku ini sebagai suplemen dalam kegiatan penelaahan Alkitab kategorial, khotbah, katekisasi, diskusi kelompok tematik, surat pastoral, buletin dan publikasi yang diselenggarakan oleh gereja, organisasi kemahasiswaan atau organisasi Kristen lainnya.

Pengguna buku ini dapat membuat pertanyaan-pertanyaan di setiap bab atau pokok bahasan untuk memperdalam isu, menggali kasus-kasus terkait yang terjadi di lingkungan atau konteks masing-masing, dan mengembangkan refleksi teologis.

SAMBUTAN

Tokoh agama adalah aktor penting dalam melakukan pendidikan politik masyarakat. Tokoh agama juga pelaku utama yang mampu menyampaikan pesan kedamaian antar umat beragama terutama di tengah gejolak politik yang dapat membangun praktik politik uang dan politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA).

Untuk itu, kehadiran literasi damai dan menyejukkan sangat dibutuhkan. Untuk menelurkan itu, Bawaslu menginisiasi sebuah gagasan sebagai bentuk upaya strategis agar para Tokoh agama dapat mendukung Pemilu yang terbebas dari praktik politik uang dan politisasi isu SARA. Dengan begitu dapat tercipta Pemilu yang aman dan berkualitas.

Gagasan untuk melibatkan tokoh-tokoh agama dalam menciptakan Pemilu damai, aman dan berkualitas dimanifestasikan dengan menggelar pertemuan-pertemuan. Forum-forum yang dibangun itu membahas persoalan-persoalan dalam Pemilu, pencegahannya dan solusinya. Dari pertemuan-pertemuan tersebut tergalaslah pembuatan Buku Materi Ceramah Pengawasan dengan Perspektif Agama.

Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.

Pada akhirnya buku ini hadir sebagai oase baru di tengah-tengah maraknya isu politisasi uang dan SARA dalam pemilu. Sehingga ke depan, Pemilu dapat berjalan lebih baik, aman dan berkualitas.

“Bersama rakyat awasi Pemilu, Bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu”

Abhan

Ketua Bawaslu

KATA PENGANTAR PGI

Dengan penuh kegembiraan kami menyambut penerbitan buku yang digagas oleh Bawaslu RI. Hal ini adalah bentuk konkret pendidikan kewarganegaraan lintas agama dan lintas instansi. Indonesia adalah negara besar. Kita membutuhkan kerja-sama lintas agama dan lintas instansi untuk membuat Indonesia tumbuh sebagai negara demokratis yang maju dan beradab. Dalam konteks ini, gereja-gereja di Indonesia dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) adalah mitra kritis-konstruktif pemerintah.

Buku ini kami tempatkan dalam bingkai kerja sama gereja dengan instansi pemerintah, dalam hal ini Bawaslu RI, untuk kepentingan pendidikan kewarganegaraan. Warga gereja adalah juga warga negara, warga bangsa ini. Karenaitu, warga gereja mempunyai tanggung-jawab, sama seperti warga negara dari agama lain, untuk membangun dan memajukan bangsa. Tanggung-jawab ini dijamin oleh konstitusi dan dilegitimasi oleh iman kristiani. Artinya, panggilan membangun bangsa adalah panggilan kebangsaan sekaligus panggilan iman-teologis.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu instrumen penting untuk membangun bangsa secara demokratis, sebab melalui nya kita memilih dan memberikan kepercayaan kepada mereka yang akan menyelenggarakan pemerintahan. Pemerintah menjadi pemimpin yang berperan besar dalam menentukan kemajuan bangsa. Salah memilih pemimpin berarti kita membuat kesalahan yang akibatnya akan dirasakan dalam jangka panjang, minimal lima tahun ke depan. Karena itu, warga negara tidak boleh asal saja memilih pemimpin.

Buku ini diharapkan akan membuka wawasan, memberi tuntunan, dan membangun ruang diskusi, agar warga gereja dapat menjadi warga negara yang partisipatif dan kritis dalam mewujudkan tanggung-jawab kebangsaannya.

Partisipasi warga gereja adalah hal yang vital bagi pembangunan demokrasi. Di Era Reformasi di mana kebebasan begitu dijunjung tinggi, kita berharap kebebasan warga dapat dipakai secara positif, kritis, dan konstruktif, sehingga partisipasi membuahkan hasil yang baik bagi kemajuan demokrasi dan demi terciptanya kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Itulah sebabnya, PGI menghimbau supaya hak dan kewajiban sebagai warga negara dapat dipergunakan oleh warga gereja dalam mensukseskan Pemilu damai dan membangun demokrasi yang bermartabat sesuai dengan spirit yang dibangun dalam buku ini.

Kiranya dengan partisipasi yang kritis dan konstruktif dari semua umat beragama di Indonesia, khususnya warga gereja, bangsa kita akan terus maju dan menjadi bangsa besar yang disegani dalam pergaulan internasional sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Tuhan memberkati bangsa kita.

Jakarta, Mei 2018

Jeirry Sumampow, S.Th
Kepala Hubungan Masyarakat PGI

DAFTAR ISI

BAGAIMANA MENGGUNAKAN BUKU INI?	5
SAMBUTAN	6
KATA PENGANTAR PGI	8
PENDAHULUAN	12

BAB 01

GEREJA, POLITIK, DEMOKRASI, DAN PEMILU	19
Memahami Gereja dan Politik	20
Demokrasi dan Pemilu	27

BAB 02

PARTISIPASI KRISTEN SEBAGAI HAK DAN TANGGUNG JAWAB	37
Partisipasi Kristen sebagai Hak dan Kewajiban	37
Partisipasi Sebagai Tanggung Jawab	41
Wujudkan Pemilu Damai	45
Mewujudkan Demokrasi yang Bermartabat	52

BAB 03	
MEMILIH PEMIMPIN YANG NEGARAWAN DAN POLITISI BERINTEGRITAS	57
Pemimpin Negarawan dan Politisi Berintegritas	57
Memilih Pemimpin yang Negarawan dan Politisi Berintegritas	61
BAB 04	
ETIKA KRISTEN DAN KEPEMILUAN	70
Katakan Tidak Pada Uang	70
Tidak Main SARA	75
Bijak Bermedia	77
Menerima Walau Tidak Setuju	80
KESIMPULAN	83
DAFTAR ACUAN	86

PENDAHULUAN

DALAM SEJARAH PANJANG DEMOKRASI DI INDONESIA, TERCATAT BEBERAPA MASA KELAM. MASA PALING KELAM ADALAH ERA ORDE BARU (ORBA) YANG DITANDAI DENGAN PEMERINTAHAN YANG OTORITER DAN SARAT KOLUSI, KORUPSI, DAN NEPOTISME. SUARA MASYARAKAT DIBUNGKAM, PERBEDAAN PANDANGAN DIANGGAP PEMBANGKANGAN, DAN SEGALA BENTUK PROTES ATAU PERLAWANAN DILUMPUHKAN KARENA MENGANCAM “STABILITAS DAN KEAMANAN NEGARA”.

Rakyat dicekoki dengan jargon: “Politik *No*, Nasi *Yes*”! Rakyat tidak perlu ikut campur urusan politik, cukup isi perut dengan nasi. Dengan dukungan militer (ABRI), Soeharto menguasai seluruh sendi kehidupan bersama, dari pusat kota sampai ke desa-desa. Suka atau tidak, masyarakat hanya bisa diam tiarap menghadapi kesewenangan pemerintahan. Mengkritik pemerintah, akan distigma sebagai komunis yang diidentikkan anti-Tuhan. Dapat dibayangkan, bagaimana seseorang atau sekelompok orang yang dicap anti-Tuhan atau ateis bertahan hidup di negara beragama seperti Indonesia. Mereka tidak hanya menjadi musuh pemerintah tetapi juga musuh masyarakat dan hidupnya terancam. Kondisi ini lama kelamaan memupuk apatisme rakyat terhadap politik (baca: pemerintah). Ironisnya, apatisme ini justru melanggengkan otoritarianisme Orde Baru hingga mampu berkuasa tiga puluh dua tahun lamanya.

Pasca-Orba Indonesia memasuki masa kebebasan politik yang besar setelah rezim Soeharto lengser. Reformasi politik pun

bergulir. Konteks politik Indonesia bergeser dari era otoritarianisme atau kesewenang-wenangan ke era demokrasi atau kebebasan. Di era Reformasi, rakyat Indonesia mulai menikmati dan menggunakan hak-hak politiknya, misalnya memilih wakil-wakil rakyat di DPR dan DPRD, serta presiden, gubernur, walikota, bupati, dan para wakilnya, dan pemilihan ini pun dilakukan secara langsung. Bahkan, setiap orang bisa maju sebagai calon pemimpin (presiden, gubernur, bupati, walikota). Seiring terbukanya kebebasan politik, banyak partai politik muncul mulai dari yang berlandaskan agama hingga nasional. ABRI, yang kemudian berubah menjadi TNI dan POLRI, tidak lagi diperkenankan untuk aktif berpolitik secara praktis seperti di masa Orde Baru. Departemen Penerangan sebagai corong pemerintah Orde Baru ditutup, media cetak maupun elektronik mendapatkan ruang kebebasan besar sebagai *watch dog* atau anjing penjaga yang mengawasi jalannya pemerintahan sekaligus mencerahkan dan menyuarakan aspirasi masyarakat yang selama ini dibungkam. Kenyataan ini membuat posisi rakyat sebagai subjek politik dalam kehidupan bernegara semakin kuat. Di masa Reformasi, supremasi militer diganti dengan supremasi sipil. Rakyatlah yang berdaulat dan menjadi penentu kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Pemilihan umum, baik pemilihan eksekutif (presiden, gubernur, walikota, dan bupati) maupun legislatif (DPR dan DPRD) adalah momentum perayaan demokrasi di mana rakyat langsung menyatakan kedaulatan politiknya secara konkret. Sejak 1998, ketika era Reformasi dimulai sampai saat ini, negara kita tercatat telah menyelenggarakan empat kali pemilu presiden, yakni di tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Pada tahun 2019 kita akan melangsungkan

Pemilu serentak baik Pileg mau pun Pilpres yang kelima. Tahun 2018, kita kembali melaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah, terdiri dari 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Angka ini menunjukkan Pilkada tahun 2018 lebih besar dari Pilkada tahun 2017 lalu yang dilaksanakan di 101 daerah, terdiri dari 7 provinsi dan 94 kabupaten/kota.

Berkaca dari pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya pengalaman Pilkada 2017, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mencatat sejumlah hal penting yang dirangkum dalam **Indeks Kerawanan Pemilu (IKP)**. Kerawanan pemilu adalah segala hal yang ber-potensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis (Bawaslu2017, 4). Berdasarkan hasil penelitian dan keterlibatan langsung dalam proses-proses Pemilu, Bawaslu membagi kerawanan itu di dalam tiga dimensi, yakni *penyelenggaraan*, *kontestasi*, dan *partisipasi*. Dimensi penyelenggaraan terkait dengan pihak penyelenggara pemilu, dimensi kontestasi terkait para calon dari partai politik yang bersaing untuk mendapatkan kursi kekuasaan, sedangkan dimensi partisipasi berhubungan dengan keterlibatan masyarakat pemilih.

Kerawanan pemilu dalam tiga dimensi tersebut terjadi di berbagai wilayah Pilkada dengan indeks rendah, sedang, sampai tinggi, dan memiliki karakteristik kerawanan yang berbeda dan unik (Bawaslu 2017, 75). Dalam **dimensi penyelenggaraan**, Bawaslu mencatat tingginya kerawanan berkait-paut dengan aspek integritas dan profesionalitas, di mana pihak penyelenggara Pemilu tidak mampu menjaga netralitas, terjadi penyalahgunaan wewenang, serta daftar pemilih tetap (DPT) bermasalah. Sedangkan dalam **dimensi kontestasi**, kerawanan terjadi sejak pencalonan sampai konflik antarkontestan dan massa pendukung saat kampanye. Menurut

catatan Bawaslu, model-model kampanye hitam, politisasi SARA, dan politik uang mewarnai jalannya kontestasi Pemilu di Indonesia. Dalam **dimensi partisipasi**, hak pilih yang tidak dipakai, kontrol masyarakat rendah, dan kekerasan terhadap pemilih berkontribusi besar terhadap kerawanan Pemilu. Tidak hanya itu, politisasi budaya pun merupakan bagian dari kerawanan Pilkada dan Pemilu. Pengaruh tokoh agamadi beberapa daerah jugamenjadi incaran para kontestan. Misalnya, di Papua seorang kepala suku dapat bertindak sebagai satu-satunya pemilih yang mengatas namakan warga di dalam sukunya. Karena itu, bila kepala suku dapat dipengaruhi, maka dukungan suara akandiperoleh. Di Sumatera Utara, ada "amplop ingot-ingot" yang mengeksploitasi tradisi Batak untuk kepentingan si kontestan. Padahal, semua ini berpotensi melanggar asas demokrasi bermartabat.

Tiga dimensi kerawanan yang diperlihatkan oleh Bawaslu itu menunjukkan bahwa pemilu yang damai dan demokrasi bermartabat hanya dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dan kerja sama yang baik seluruh anak bangsa. Pemerintah, penyelenggara Pemilu, partai politik, seluruh elemen bangsa, dan warga negara mempunyai posisi dan pengaruh yang penting untuk memajukan proses demokrasi dan menyukseskan pemilu.

Gereja-gereja di Indonesia dan warga gereja adalah bagian integral dari bangsa ini. Gereja (baca: kita) bukan penumpang gelap (Yewangoe 2009, vii-viii). Kita bukan anak tiri. Di Republik ini, kita semua adalah anak kandung. Kita juga bukan warga minoritas.

“DI HADAPAN HUKUM, KITA SAMA-SAMA WARGA NEGARA YANG MEMILIKI KEDUDUKAN SETARA, HAK DAN KEWAJIBAN SEPERTI WARGA NEGARA DARI AGAMA LAIN. KARENA ITU, GEREJA-GEREJA DAN WARGA GEREJA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK IKUT AMBIL BAGIAN DALAM PROSES BERDEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN BANGSA (*NATION BUILDING*). ”

Gereja-gereja dan warga gereja dapat berkontribusi menyukseskan pemilu yang damai.

Sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*), kita patut berbangga atas sejumlah kemajuan yang dicapai dalam proses hidup berdemokrasi. Pemilu langsung, banyaknya partai politik yang terlibat, kebebasan pers, dan kebebasan berpendapat warga negara adalah capaian-capaian positif yang mesti disyukuri. Kita dapat mengatakan bahwa secara prosedural kita telah mencapai taraf kemajuan yang signifikan dalam proses berdemokrasi. Tetapi secara substansial kita masih perlu bekerja keras untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita. Politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian, serta kampanye hitam berlangsung terang-terangan sepanjang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017 lampau. Media sosial (*Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram*, blog, dan situs web), media cetak, dan media daring ikut menyorotinya. Karena itu, kita perlu lebih was was terutama menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Dua pertanyaan penting muncul terkait persoalan-persoalan di atas: Bagaimana sikap gereja dan warga gereja? Sikap politik yang seperti apa yang dapat diambil dan dilakukan oleh gereja dan warga gereja? Tentu saja, gereja dan warga gereja tidak boleh berdiam diri dan apatis. Diam dan apatis hanya akan melanggengkan penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan seperti masa Orde Baru.

Namun, terlibat tanpa sikap kritis juga dapat menyebabkan gereja dan warga gereja serta umat agama lain menjadi objek eksploitasi politik, seperti yang terjadi di era Reformasi dalam praktik politisasi SARA dan politik uang. Gereja dan warga gereja memang harus berpolitik. Berpolitik? Bukankah tabu? Yang disebut gereja berpolitik di sini adalah: secara institusional gereja memihak moralitas sesuai dengan nilai-nilai Kerajaan Allah, yakni untuk menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Karena itu, gereja perlu mendorong warga gereja untuk terlibat secara kritis, positif, realistis, dan konstruktif dalam memajukan bangsa melalui proses demokrasi.

Buku kecil ini ditulis bagi para pendeta, majelis jemaat, pegiat gereja, dan warga gereja untuk membangun kesadaran dan mendorong partisipasi gereja dan warga gereja dalam berpolitik, secara khusus dalam upaya menegakkan Pemilu yang damai dan membangun kehidupan berdemokrasi yang bermartabat. Panggilan partisipasi ini dimaknai sebagai panggilan kewarganegaraan sekaligus panggilan iman.

BAB 01

**UMAT KRISTEN, KHUSUSNYA
DI INDONESIA, MEMERLUKAN
PANDANGAN TEOLOGI POLITIK YANG
LEBIH BAIK DEMI MEWUJUDKAN
KEHADIRAN GEREJA YANG RELEVAN
DAN SIGNIFIKAN.**

GEREJA, POLITIK, DEMOKRASI, DAN PEMILU

Adakah kait-mengait antara gereja, politik, demokrasi, dan Pemilu? Bagi sebagian orang, gereja dan politik tidak memiliki hubungan. Gereja itu suci, politik itu kotor. Orang beranggapan bahwa gereja itu bersifat rohani, sedangkan politik dan elemen-elemennya bersifat duniawi. Sesuatu yang rohani dan duniawi ini ditempatkan sebagai dua kutub berlawanan dan terpisah. Gereja sebagai entitas rohani dipandang suci sebab berasal dari Allah yang suci, sedangkan politik dipandang kotor, tidak suci, dan sarat dengan dosa. Suci itu ibarat terang, sedangkan kotor itu laksana kegelapan. Terang dan gelap tidak mungkin bersatu. Demikian juga halnya dengan gereja dan politik, tidak mungkin bersatu.

Tidak bisa dipungkiri, dualisme pandangan atau pola pikir ini menempatkan gereja pada posisi yang lebih tinggi daripada politik, dan sebaliknya politik lebih rendah daripada gereja. Implikasi praktisnya adalah gereja dan warga gereja semakin menjauh kandisebut dari dunia politik. Mereka acuh tak acuh akan dinamika hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Gereja dan warga gereja baru akan bersuara ketika misalnya kenyamanan ibadah terusik. Hal itu berarti keterlibatan gereja dalam politik praktis semata-mata demi kenyamanan/kepentingan diri sendiri. Langkah politik pragmatis dan sempit seperti ini justru membuat kotak-kotak SARA semakin menganga. Alhasil, praktik politik yang demikian justru kontra-

produktif, baik dengan semangat kebangsaan maupun dengan semangat Injil Kerajaan Allah itu sendiri.

Dengan kata lain, pandangan dan sikap yang mempertentangkan gereja dan politik tidak memadai untuk menjawab dinamika dan tantangan yang ada. Umat Kristen, khususnya di Indonesia, memerlukan pandangan teologi politik yang lebih baik demi mewujudkan kehadiran gereja yang relevan dan signifikan. Gereja memerlukan pembaruan pandangan tentang dirinya dan politik sehingga dampak positif kehadiran gereja dapat dirasakan di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara.

MEMAHAMI GEREJA DAN POLITIK

Gereja memiliki dasar dan motivasi yang berbeda dengan parpol dan sebaliknya. Parpol dibentuk oleh manusia yang memiliki kesamaan pandangan dan cita-cita untuk meraih kekuasaan dan mewujudkan kesejahteraan, sedangkan gereja diyakini dibentuk oleh Allah untuk menjalankan misi Allah di tengah dunia. Itu sebabnya, gereja harus selalu dilihat dalam desain besar visi Allah demi keselamatan dunia (Faith and Order, 2013).

Di sisi lain, gereja juga tidak dapat disamakan persis dengan parpol. Ketika gereja dilihat sebagai institusi yang sama saja dengan parpol, gereja akan dilibatkan secara institusional dalam perebutan kekuasaan. Gereja akan terjebak pada politik praktis dan mengusung paslon tertentu. Hal ini berpotensi besar membawa gereja pada konflik, bahkan memecah-belah gereja sebagai sebuah persekutuan (*koinonia*). Gereja sebagai sebuah institusi mestinya tidak memobilisasi umat pada parpol atau paslon tertentu, sebab warga gereja tentu memiliki

pilihannya masing-masing. Jika gereja berpihak pada salah satu paslon, tentu saja menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga gereja yang memiliki pilihan paslon berbeda. Hal ini tidak seharusnya terjadi, gereja mesti menjaga keberlangsungan hidup persekutuan seluruh umat.

Jadi, baik pandangan dan sikap yang mempertentangkan gereja dan politik maupun yang menyamakan gereja dengan (institusi) politik sama-sama tidak memadai. Gereja dan politik mesti ditempatkan dalam hubungan yang dialektis. Artinya, keduanya saling terkait, saling me-pengaruhi, sertasaling menerangi dan berorientasi untuk membangun kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Alhasil, keduanya dapat dibedakan, tetapi juga tidak dapat dilepas-pisahkan.

Jika ditelusuri lebih jauh, sebutan “gereja” sendiri terkait erat dengan perpolitikan di masa lalu. Istilah “gereja” berasal dari bahasa Yunani *ekklesia* (*ek*=keluar dan *kaleo*=memanggil) dan dipadankan dengan kata *qahal* (“perkumpulan”) dalam Perjanjian Lama. Istilah *ekklesia* pada dasarnya adalah sebuah istilah politik dalam konteks demokrasi di masa Yunani kuno. Istilah ini dilekatkan pada pertemuan warga *polis* atau kota, di mana merekadipanggil keluar dari rumah masing-masing untuk bertemu di ruang publik, seperti pasar atau alun-alun kota guna membicarakan masalah-masalah dan tujuan hidup bersama. Dalam *ekklesia* ini segala sesuatu dirundingkan dan diputuskan secara bersama-sama. Inilah cikal bakal pemerintahan yang kemudian disebut sebagai pemerintahan demokratis.

Dengan memakai istilah *ekklesia* pada gereja, maka sebetulnya sejak awal gereja tidak menempatkan dirinya

sebagai lawan dunia sekuler atau politik. Hal itu justru menegaskan bahwa gereja adalah bagian dari realitas sosial-politik. Bedanya, *ekkklesia* atau gereja secara teologis dimaknai sebagai persekutuan yang dipanggil “keluar” dari kegelapan menuju terang (1 Petrus 2:9). Inilah keunikan yang membedakan gereja dengan perkumpulan lain. Gereja tidak didirikan atas dasar kesamaan suku, golongan, atau hobi tertentu. Gereja tidak dibatasi untuk sekelompok orang saja, melainkan gereja terbuka bagi semua. Di dalam Yesus, Allah mendirikan gereja sebagai sebuah paguyuban atau komunitas yang egaliter, setara satu dengan yang lain, sebagaimana terlihat dalam kisah jemaat mula-mula. Gereja atau jemaat mula-mula saling mengasihi dan berbagi dalam kesetaraannya di hadapan Tuhan yang tidak pernah membedakan orang (bdk. Kis. 2: 43-47) (de Gruchy, 2003, 53-55).

Allah juga mempunyai misi atas gereja. Misi tersebut bukan untuk mengangkat gereja dari kehidupan di dunia ini, melainkan mengkhususkan dan memandatkan gereja untuk kembali ke dalam dunia bersama-sama dengan Allah berkarya di dunia ini. Inti misi gereja adalah pemberitaan kabar keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus melalui kata dan perbuatan. Keselamatan itu tidak hanya terkait dengan hal-hal rohani, melainkan seluruh aspek kehidupan manusia di dunia. Salah satu kata padat makna yang dipakai dalam Alkitab untuk menggambarkan keselamatan itu adalah *shalom* atau damai sejahtera, baik dalam kehidupan rohani maupun jasmani. *Shalom* mengacu pada pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan sertamanusia dengan alam semesta. *Shalom* juga terkait pewujudan keadilan dan perdamaian (de Gruchy 2003, 48-49). Hal tersebut ditegaskan kembali oleh

Dewan Gereja-gereja Dunia (DGD) yakni bahwa perdamaian dan keadilan adalah aspek konstitutif dari keselamatan. Keselamatan sebagai anugerah Allah mesti terlihat dan dapat dirasakan di dalam atau melalui kehidupan yang adil dan damai di dunia (Faith and Order 2013). Dengan kata lain, keselamatan bukan hanya persoalan individu, melainkan juga sosial. Dalam hal ini gereja terpanggil untuk mewujudkan keselamatan atau *shalom* di tengah-tengah realitas dunia yang kerap kali diwarnai oleh kontestasi, konflik, dan kekerasan.

Sejalan dengan semangat misi *ekklesia* di atas, persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dalam Pemahaman Bersama Iman Kristen (PBIK) menyebutkan bahwa gereja sebagai entitas yang dibentuk dan dibangun oleh Roh Kudus, ditempatkan oleh Tuhan di dalam konteks sosial, politik, ekonomi dan budaya tertentu. Demikian halnya dengan gereja-gereja di Indonesia, dipanggil dan ditempatkan Tuhan sendiri untuk melaksanakan tugas panggilannya di tengah bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang diyakini sebagai anugerah dari Tuhan (PGI 2016, 23). Dalam paragraf ke-21, gereja mengakui bahwa negara adalah alat Tuhan yang bertujuan untuk menyejahterahkan manusia dan memelihara ciptaan Allah (PGI 2016, 25).

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa baik gereja maupun negara sama-sama memiliki visi politik. Keduanya terpanggil untuk menyejahterahkan manusia dan memelihara ciptaan Allah dalam relasi-relasi yang setara dan adil. Ini berarti secara ideal politik bukan sesuatu yang kotor. Sebaliknya, politik memiliki visi yang suci, mulia, sebab

bertujuan untuk memajukan manusia dan memelihara ciptaan Allah.

Secara etimologis, politik dibentuk dari kata Yunani “*polis*” yang berarti kota. Politik sebagai sebuah seni hidup dan ilmu dimaknai sebagai upaya bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi warga kota atau negara. Hal ini tentu sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab:

USAHAKANLAH KESEJAHTERAAN KOTA KE MANA KAMU AKU BUANG, DAN BERDOALAH UNTUK KOTA ITU KEPADA TUHAN, SEBAB KESEJAHTERAANNYA ADALAH KESEJAHTERAANMU (YEREMIA 29:7).

Entah disadari atau tidak, amanat ini adalah amanat politik. Amanat politik tersebut pertama-tama diberikan kepada orang-orang Israel dalam pembuangan di Babel. Dalam situasi terjajah, yakni ketika mereka menjadi korban penindasan, mereka tetap diminta untuk berpolitik dengan baik dan benar, bukan mempraktikkan politik balas dendam saat mendapatkan kesempatan. Politik yang baik dan benar itu adalah politik untuk kesejahteraan kota, politik demi kebaikan bersama (*bonum commune*), dan bukan kepentingan pribadi atau pun golongan.

Manakala visi *bonum commune* itu bergeser kepada kepentingan diri atau kelompok tertentu, maka gereja mesti menginterupsi. Alkitab menyebut tindakan interupsi itu dengan istilah tindakan profetis. Dalam Perjanjian Lama, peran profetis tersebut dilakukan oleh para nabi. Mereka memperdengarkan suara profetis demi tegaknya keadilan dan kebenaran bagi

semua. Bahkan, para nabi ini terkadang berbicara dengan nada yang tinggi dan semangat menggebu-gebu. Pantang bagi mereka untuk berkompromi. Apalagi, “bermain mata” dan “berselingkuh” dengan penguasa yang korup. Bagi para utusan Tuhan ini, keadilan dan kebenaran adalah nilai dan prinsip utama yang mesti diterapkan. Setiap pemimpin harus tunduk dan mengabdikan pada keadilan dan kebenaran. Keadilan, kebaikan atau keadilan sosial, adalah barometer kesehatan masyarakat. Karena itu, para nabi seperti Amos dalam Perjanjian Lama berseru lantang:

“TETAPI BIARLAH KEADILAN (TSEDĀKAH) BERGULUNG-GULUNG SEPERTI AIR, DAN KEBENARAN SEPERTI SUNGAI-SUNGAI YANG SELALU MENGALIR” (AMOS 5:24).

Kitab Perjanjian Baru juga memperlihatkan sisi yang sama. Inkarnasi Yesus menjadi sebuah tonggak yang paling bersejarah, dimana Yesus tampil sebagai nabi, imam, dan raja yang mengabdikan bagi tegaknya cinta kasih, keadilan, dan kebenaran. Ia sama sekali tidak berkompromi dengan ketidakadilan dan ketidakbenaran. Yesus bahkan tidak tinggal di istana, karena istana begitu korup kala itu. Yesus justru memilih hidup bersama nelayan di desa-desa pesisir yang miskin. Ia tinggal dan melayani orang-orang marginal. Tentu hal ini adalah sebuah pilihan politik yang sadar dan penuh risiko, bahkan nyawa menjadi taruhan. Hidup-Nya ia kurbankan supaya tidak ada lagi korban-korban baru yang berjatuh. Yesus memberikan contoh bagaimana politik seharusnya bekerja. Politik bukan alat kekuasaan, melainkan etika untuk melayani (Silaen dkk. 2007, xix).

Dengan demikian, politik yang diperlihatkan oleh para nabi dan Yesus Kristus di dalam pelayanan-Nya adalah bukan politik kekuasaan, melainkan politik moral dan politik pembebasan. Politik moral dimaksudkan untuk membangun karakter dan mental aktor politik, pemimpin, dan masyarakat untuk menjadi pelayan pelayan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai etik-moral-spiritual. Sedangkan politik pembebasan adalah praksis pemerdekaan dari segala bentuk penindasan, baik penindasan kultural maupun struktural. Berkaitan dengan semangat pembebasan ini, Gustavo Gutierrez, sesepuh teologi pembebasan dari Amerika Latin, menyebutkan bahwa iman tidak hanya untuk menegaskan eksistensi Allah. Lebih dari itu, iman justru menceritakan kepada kita bahwa Allah mengasihi kita, dan Ia meminta respons cinta kita. Respons tersebut diberikan melalui cinta pada sesama, dan hal itulah yang dimaksudkan sebagai komitmen

**POLITIK YANG
DIPERLIHATKAN OLEH PARA
NABI DAN YESUS KRISTUS
DI DALAM PELAYANAN-
NYA BUKAN POLITIK
KEKUASAAN, MELAINKAN
POLITIK MORAL DAN POLITIK
PEMBEBASAN.**

terhadap Allah dan sesama (Gutierrez 1996, 24). Karena itu, sejatinya gereja yang beriman tidak bisa berada untuk dirinya sendiri. Meminjam pemikiran Dietrich Bonhoeffer, pendeta Protestan asal Jerman yang gigih menentang Adolf Hitler dan Nazisme, gereja itu selalu ada untuk yang lain, *being for other* (de Grucy 1993, 54). Inilah orientasi etis dan misional gereja.

Karena itu, benar jika Martin Sinaga, pendeta Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), menyebutkan bahwa mengada bagi sesama, *being for others*, adalah *notae ecclesiae* gereja, tanda atau sifat hakiki gereja (Sinaga 1998, 69). Jadi, gereja itu tidak hanya bersifat satu, kudus, am, dan rasuli, sebagaimana yang gereja-gereja terima sebagai warisan bersama berdasarkan pengakuan iman Nicea, tetapi juga mengada bagi sesama. Manakala gereja hanya terpusat untuk diri sendiri, saat itulah “gereja” tidak lagi menjadi gereja. Ia sudah berhenti menjadi gereja.

DEMOKRASI DAN PEMILU

Dalam sistem perpolitikan dan pemerintahan yang menganut asas demokrasi, terbuka ruang bagi gereja untuk mengaktualkan keyakinan dirinya mengenai gereja (eklesiologi) dan panggilan-politiknya (misi) dalam kenyataan hidup sehari-hari bersama dengan agama dan umat berkepercayaan lain. Kesempatan ini adalah anugerah yang mesti disyukuri dan diisi dengan rasa tanggung jawab sebagai sebuah amanat oleh gereja dan warga gereja.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam pemikiran Bung Hatta, Proklamator dan pendiri bangsa Indonesia, menurut kutipan Romo Magnis Suseno, dikatakan bahwa demokrasi kita berbeda dengan demokrasi model Barat. Kedaulatan rakyat di Barat hanya terjadi dalam ranah politik, sedangkan di Indonesia kedaulatan rakyat juga mencakup bidang sosial dan ekonomi. Perbedaan ini dipandang perlu oleh Hatta, sebab menurutnya demokrasi di Barat dilakukan dalam rangka individualisme, sementara kehidupan ekonomi dikuasai oleh

kaum kapitalis yang masih tergolong minoritas. Sebaliknya, demokrasi Indonesia dibangun dari dalam kehidupan sehari-hari di pedesaan Indonesia sangat menekankan musyawarah dan mufakat, hak-hak rakyat (termasuk hak untuk mengadakan protes), dan cita-cita tolong-menolong (Suseno 1997, 10-11). Demokrasi Indonesia menjunjung tinggi hak-hak individu, namun tidak individualistik. Semangat kebersamaan, kekerabatan, tolong-menolong, atau gotong royong sangat ditekankan sebagai kearifan masyarakat dan bangsa Indonesia. Supomo, pendiri bangsa lainnya, juga menyebutkan bahwa pembangunan Indonesia harus disesuaikan dengan struktur sosial masyarakat Indonesia, sehingga persatuan harus dikedepankan (Suseno 1997, 12-13). Demikian halnya dengan Soekarno, Proklamator sekaligus Presiden (pertama) RI, yang mengingatkan supaya kita mewujudkan kehidupan demokrasi yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Kita tidak boleh melakukan demokrasi yang diimpor dari Barat karena memang tidak cocok dengan jiwa keindonesiaan (Suseno 1997, 19-20).

PANCASILA ADALAH JIWA BANGSA INDONESIA. PANCASILA MENJADI DASAR DAN IDEOLOGI PEMERSATU INDONESIA DI DALAM SEGALA KERAGAMAN DAN KEKAYAANNYA. ITU SEBABNYA, DEMOKRASI YANG DIBANGUN DI INDONESIA ADALAH DEMOKRASI YANG BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA.

Hal ini membuktikan bahwa demokrasi bukan paham yang kaku dan dogmatis. Bukan pula milik pusaka orang Barat, kendati demokrasi dimatangkan sebagai sebuah sistem pemikiran dan pemerintahan di Barat. Demokrasi adalah paham yang relatif, kontekstual, dan dinamis (Suseno 1997, 60). Artinya, demokrasi dapat dikembangkan secara berbeda dari satu negara ke negara lain, tentu dengan memperhitungkan kondisi-kondisi aktual dan budaya yang ada dalam suatu negara. Dengan demikian, demokrasi terus bertumbuh dan berkembang secara dinamis dan khas, misal saja di Indonesia, kita mengalami dan menjalani demokrasi yang dijiwai Pancasila.

Hal ini perlu dikemukakan di sini, mengingat dewasa ini terdapat kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang beranggapan bahwa demokrasi itu hanyalah paham Barat dan bukan paham Indonesia. Bahkan, terdapat kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, dengan memanfaatkan demokrasi, hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi lain. Padahal, Pancasila adalah konsensus bersama dan menjadi dasar negara kita. Hemat kami, demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran yang sehat dari semua agama yang ada di Indonesia. Misalnya, Kristen. Dalam kekristenan kita diajarkan untuk mengasihi Allah dan mengasihi manusia (lih. Matius 22:37-40). Kedua hukum itu merupakan intisari dari ajaran kekristenan. Bila orang sungguh-sungguh mengasihi Allah, maka ia pasti mengasihi manusia begitu pula sebaliknya. Bila seseorang sungguh-sungguh mengasihi manusia, maka ia juga akan mengasihi Allah. Mengasihi Allah tidak bisa tidak mengasihi manusia. Mengasihi Allah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Keduanya utuh dan saling menyempurnakan. Dalam pandangan kami, substansi

Pancasila juga tidak lain dan tidak bukan adalah kasih. Kasih akan Tuhan dicerminkan oleh Sila Pertama Pancasila, dan kasih akan sesama kentara dalam keempat sila yang menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, musyawarah-mufakat, dan keadilan sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pancasila bersifat alkitabiah. Dalam artian, selaras dan serasi dengan ajaran kekristenan yang dikonstruksi sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Alkitab. Oleh karena itu, bagi kita orang Indonesia yang beragama Kristen, menghayati dan mengamalkan Pancasila adalah bagian dari panggilan kebangsaan dan demokrasi yang mesti diaktualkan pada masa kini dan juga pada masa-masa yang akan datang. Panggilan ini mendapatkan fondasi yang kuat dan dimotivasi secara jernih oleh iman kita.

Namun, apa saja ciri dari negara demokratis yang perlu kita ketahui dan perjuangkan terus-menerus dalam semangat dan nilai-nilai Pancasila? Demokrasi, sebagaimana telaah Romo Magnis Suseno, mempunyai lima gugus ciri sebagai berikut (Suseno 1997, 58-60):

- 1. Negara hukum**, berarti kekuasaan negara terikat pada hukum. Tanpa hukum, demokrasi akan menjadi anarki. Sebaliknya, tanpa demokrasi, hukum akan menjadi totaliter. Berikut lima ciri negara hukum:
 - a. Fungsi-fungsi kenegaraan dijalankan oleh lembaga-lembaga negara sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar;
 - b. Undang-undang Dasar menjamin hak asasi manusia (HAM) sehingga negara dan hukum tidak menjadi penindas;

- c. Badan-badan negara menjalankan kekuasaan masing-masing selalu dan hanya atas dasar hukum;
- d. Terhadap tindakan badan negara yang sewenang-wenang, masyarakat dapat mengadu ke pengadilan dan putusan pengadilan dilaksanakan oleh badan negara yang berwajib;
- e. Badan kehakiman bebas dan tidak memihak.

2. Kontrol efektif terhadap pemerintah, memuat:

- a. Pemerintah wajib mempertanggungjawabkan kebijakan-kebijakan yang diambil;
- b. Pemerintah berada di bawah pengawasan terus-menerus baik dari Badan Perwakilan Rakyat maupun masyarakat, khususnya pers dan media;
- c. Para wakil rakyat bebas menyatakan pendapat mereka, menuntut pertanggung jawaban dan mengkritik serta menolak usulan pemerintah;
- d. Pemerintah tidak dapat membuat undang-undang atau menciptakan norma hukum, sekurang-kurangnya tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- e. Pemerintah diangkat dan diberhentikan secara damai oleh rakyat atau Badan Perwakilan Rakyat dalam kaitan dengan hasil pemilihan umum.

3. Lembaga pemilihan umum, antara lain:

- a. Ada pilihan bebas antara sekurang-kurangnya dua kandidat atau dua partai;
- b. Secara efektif sebagian besar warga negara berhak dan mampu ikut memilih;

- c. Kebanyakan warga negara berhak mencalonkan diri untuk dipilih;
- d. Melalui Pemilihan Umum itu dipilih Badan Perwakilan Rakyat yang mempunyai hak legislatif, sendiri atau bersama dengan pemerintah, serta hal untuk mengontrol pemerintah.

4. Prinsip mayoritas, artinya: keputusan Badan Perwakilan Rakyat mengambil keputusan-keputusannya secara sepakat atau, kalau kesepakatan tidak tercapai, dengan suara terbanyak.

5. Jaminan atas hak-hak dasar demokratis rakyat, meliputi:

- a. Hak untuk menyatakan pendapat serta untuk mengkritik pemerintah, baik lisan maupun tulisan, termasuk kebebasan pers;
- b. Hak untuk mencari informasi alternatif terhadap informasi yang disajikan oleh pemerintah;
- c. Hak berkumpul;
- d. Hak membentuk serikat, termasuk hak mendirikan partai politik, dan hak berasosiasi.

Dari penjelasan mengenai gugus ciri di atas, terlihat bahwa demokrasi sangat menekankan kebebasan dan kedaulatan rakyat dalam kehidupan bernegara. Itu sebabnya, secara klasik, demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Kebebasan dan kedaulatan rakyat salah satunya terlihat di dalam Pemilu. Sebagai ciri dari negara demokrasi, Pemilu menjadi mekanisme di mana rakyat akan memutuskan siapa saja yang akan menjadi wakilnya untuk melayani kepentingan masyarakat luas. Jadi, pemilu adalah

pesta atau perayaan rakyat. Pemilu adalah instrumen sekaligus wujud konkret demokrasi itu sendiri.

Di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal satu butir satu disebutkan: "Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945." Sementara dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, diterangkan bahwa: "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis."

Pemilu yang berdasarkan hukum dan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil memberikan basis dan harapan untuk menghasilkan pemerintahan yang bermartabat dengan terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berintegritas, cakap, bertanggung jawab, dan amanah. Karena itu, rakyat mesti berpartisipasi aktif, termasuk gereja dan warga

gereja yang adalah bagian utuh dari NKRI. Bersama warga negara dari agama dan keyakinan lain, kita menjadi penentu masa depan bangsa. Demokrasi dan sistem perpolitikan yang kita anut ini memberikan kepada kita jaminan untuk terlibat secara kritis, positif, realistis dan konstruktif untuk Indonesia yang lebih baik.

Apakah sistem Pemilu langsung dan demokratis ini alkitabiah atau sejalan dengan spirit gerejawi? Tentu saja! Gereja telah terbiasa dengan sistem pemilihan yang demikian. Dalam pemilihan pemimpin-pemimpin gereja di zaman gereja perdana, para pemimpin-pelayan itu dipilih dari warga gereja. Yang terpenting adalah warga gereja memperhatikan kualifikasi dan kualitas dari mereka yang akan dipilih sebagai pemimpin-pemimpin gereja (lih. Titus 1: 5-16). Melalui pemilihan dan penetapan warga itu, gereja percaya bahwa Allah turut bekerja untuk memilih dan menempatkan pemimpin-pelayan yang bertugas untuk melayani pekerjaan dan misi Allah dalam kehidupan bergereja. Dengan pemahaman dan keyakinan ini, warga gereja juga diajak untuk menghormati dan mengikuti pola dan proses yang berkembang di dalam masyarakat pada umumnya.

KARENA ITU, RAKYAT MESTI BERPARTIPASI AKTIF, TERMASUK GEREJA DAN WARGA GEREJA YANG ADALAH BAGIAN UTUH DARI NKRI. BERSAMA WARGA NEGARA DARI AGAMA DAN KEYAKINAN LAIN, KITA MENJADI PENENTU MASA DEPAN BANGSA.

Itu berarti, pemerintah pun harus tunduk pada pemerintahan Allah, dan menjadi “alat” Allah untuk membawa *bonum commune* atau *syalom*.

Makna atau substansi dari perkataan “pemerintah tunduk kepada pemerintahan Allah” adalah menjalankan pemerintahan yang jujur dan adil sesuai kehendak Allah bagi manusia dan dunia. Maka, untuk menghasilkan pemimpin yang jujur dan adil sesuai kehendak Allah, kita pun membutuhkan sebuah prosedur dan proses pemilihan yang adil dan transparan. Proses itulah yang dirancang di dalam prosedur dan mekanisme pemilu sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang tentang pemilihan yang berlaku di negara kita. Jadi, pemilu demokratis di negara ini pun memiliki makna teologis yang mendalam, yakni sebagai sarana yang Allah pakai untuk memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin dan pelayan-pelayan masyarakat yang jujur dan adil. Jika kita tidak memanfaatkan sarana demokrasi ini dengan baik, atau pun salah dalam menentukan pilihan, itu berarti kita menyerahkan nasib bangsa ini ke dalam tangan orang-orang yang salah atau tidak tepat.

Dengan demikian, proses pemilu dalam konteks pengembangan demokrasi demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia memerlukan partisipasi aktif seluruh anak bangsa, termasuk warga Indonesia yang beragama Kristen. Partisipasi ini bukan sekadar wujud tanggung jawab terhadap nasib diri, keluarga, masyarakat, melainkan terutama bangsa. Karena itu, penting bagi kita untuk ikut memilih. Hal ini adalah hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, sekaligus panggilan iman kita selaku orang percaya.

BAB 02

KEKRISTENAN DAN ORANG-ORANG YANG PERCAYA TERUS DITANTANG UNTUK MENGHADIRKAN DIRI DALAM SEBUAH KETERLIBATAN YANG KONSTRUKTIF, KREATIF, REALISTIS, DAN KRITIS DALAM MEMBANGUN BANGSA DEMI MEWUJUDKAN CITRA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB.

PARTISIPASI KRISTEN SEBAGAI HAK DAN TANGGUNG JAWAB

PARTISIPASI KRISTEN SEBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN

Berdirinya Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa (*nation-state*) adalah hasil dari perjuangan bersama seluruh anak negeri, tidak terkecuali orang-orang Indonesia yang beragama Kristen. Di berbagai daerah di Indonesia, orang-orang Kristen menata dan membangun persatuan dan berjuang bersama saudara-saudara dari agama dan keyakinan lain untuk mengusir penjajah. Zakharia J. Ngelow, pendeta dan sejarawan gereja dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan, merekam dengan sangat baik jejak-jejak perjuangan gereja dan warga gereja dalam bukunya *Kekristenan dan Nasionalisme*. Semangat anti-penjajahan adalah semangat Kristiani. Keyakinan teologis Kristen mempersaksikan bahwa Allah menentang penjajahan dan eksploitasi. Tidak ada bangsa manapun yang dapat mengklaim dirinya sebagai bangsa atau ras yang unggul atau superior, sebab semua manusia sama-sama diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Sebaliknya, juga tidak ada bangsa manapun yang lebih inferior sehingga tidak ada yang boleh hidup dengan perasaan minder yang kompleks, seperti perasaan minder sebagai minoritas. Dalam kedudukannya sebagai gambar Allah, manusia dari segala bangsa dan agama ditempatkan secara setara.

Dengan keyakinan yang demikianlah orang-orang Kristen di Indonesia berjuang. Pattimura atau Thomas Matulesy di Maluku

Tengah berjuang untuk kebebasan masyarakat di sana, baik didorong oleh ketidaksetujuan terhadap penjajahan maupun dimotivasi oleh iman dan panggilannya sebagai manusia Maluku yang beragama Kristen. Ngelow mencatat bahwa pengangkatan dirinya sebagai *kapitan* atau panglima perang adalah sebuah panggilan dari Allah. Di saat perang yang ganas berlangsung di Saparua, Pattimura dan pasukannya membuka Alkitab di gereja dari Mazmur 17 yang berisi doa memohon pembenaran dan perlindungan Tuhan terhadap serbuan orang-orang fasik (Ngelow 1996, 23-24). Doa ini memperlihatkan bahwa penjajahan kaum kolonial-kendati memiliki agama yang sama: Kristen- sebagai wujud kefasikan yang tidak diperkenankan oleh Allah yang dipercayai oleh kekristenan itu sendiri. Kenyataan ini tersebut juga membuktikan bahwa iman Kristen memberikan daya dorong untuk melakukan perubahan dalam kehidupan sosial kala itu: bebas dari penjajahan!

Satu (lagi) tokoh dari banyak tokoh Kristen lain yang fenomenal adalah Johannes Leimena. Ia bersama para pemuda dari berbagai suku dan agama di Indonesia mengangkat sumpah untuk hidup bersama dalam semangat dan bingkai keindonesiaan pada 28 Oktober 1928: Bertanah air satu satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Tokoh Jong Ambon dan pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini terlibat dalam berbagai forum internasional untuk merundingkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Setelah kemerdekaan RI, pria sederhana dan jujur, yang berprofesi sebagai dokter ini mendapatkan banyak kepercayaan untuk membangun bangsa dalam kapasitas dan integritas yang dimilikinya. Di masa pemerintahan Soekarno,

ungkapan berikut ini menjadi kebenaran sejarah yang tidak terbantahkan, "Pemimpin kabinet pemerintahan boleh berganti, tetapi Leimena selalu menjadi anggota kabinetnya". Delapan belas kali terjadi pergantian kabinet di masa Orde Lama, namun Leimena selalu dipercaya menjadi menteri. Bahkan, tujuh kali ia mendapat mandat sebagai pejabat presiden ketika Soekarno melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri (Victor Silaen, dkk. 2007, xxi).

Sejatanya, terdapat banyak sekali pribadi orang Indonesia yang beragama Kristen yang berjuang memperebutkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Timor, sampai Maluku dan Papua. Taman makam pahlawan, baik yang bernama maupun yang anonim menjadi saksi sejarah yang bertutur banyak tentang jerih-juang dan pengorbanan anak-anak bangsa. Selain orang-orang dengan nama besar seperti Todung Sutan Gunung Mulia, A.A. Maramis, Sam Ratu Langie, sampai Frans Kaisiepo, ada pula orang-orang yang namanya tidak dicatat dalam buku-buku sejarah, tetapi memiliki kontribusi yang sangat besar dan signifikan untuk Indonesia.

Kilasannya catatan sejarah di atas perlu dikemukakan dan diangkat pada kesempatan ini adalah untuk memberikan basis historis keterlibatan Kristen dalam proses demokrasi dan pembangunan Indonesia di masa kini. Keberadaan kita saat ini merupakan kesinambungan sejarah. Setiap masa atau sejarah ada orang-orangnya, dan setiap orang tentu pula ada masa atau sejarahnya. Namun di setiap masa itu, kekristenan dan orang-orang yang percaya terus ditantang untuk menghadirkan diri

dalam sebuah keterlibatan yang konstruktif, kreatif, realistis, dan kritis dalam membangun bangsa demi mewujudkan citra kemanusiaan yang adil dan beradab.

DALAM MASA-MASA REVOLUSI DI INDONESIA, T.B. SIMATUPANG, SEORANG JENDERAL PURNAWIRAWAN DAN TOKOH EKUMENIS INDONESIA, MENGAJUKAN TETRA KATA KONSTRUKTIF/POSITIF, KREATIF, REALISTIS, DAN KRITIS SEBAGAI PARADIGMA DAN PENDEKATAN BAGI KETERLIBATAN ATAU PARTISIPASI KRISTEN DI INDONESIA

Partisipasi Kristen itu harus terjadi dengan semangat konstruktif atau jiwa yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Semangat tersebut kemudian dipikirkan dan diwujudkan dengan cara-cara yang kreatif, di mana disadari bahwa di dalam setiap tantangan, tentu terdapat peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk kemajuan dan pemenuhan harapan atau cita-cita nasional, sehingga kesulitan dan tantangan yang dihadapi tidak membuat gereja menjadi pesimis dan apatis. Kreativitas ini perlu diperhatikan agar gereja-gereja tidak sekadar mengulang-ulang pola dan cara yang sudah tidak relevan. Bersamaan dengan itu, gereja-gereja harus bersikap realistis. Artinya, gereja-gereja mesti memperhitungkan kondisi-kondisi riil dengan segala risiko yang ada supaya gereja-gereja tidak menjadi utopis dan asal kompromistis. Itu sebabnya, kata terakhir, kritis, juga perlu mendapatkan tempat penting dalam setiap keterlibatan atau partisipasi yang dilakukan oleh gereja-gereja di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Melalui *tetra* kata itu, sebetulnya Simatupang sedang mengajak gereja-gereja di Indonesia untuk melihat dan mengusahakan keterlibatannya di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara dalam terang Injil Kerajaan Allah. Nilai-nilai Injil Kerajaan Allah, seperti kasih, keadilan, kebenaran, dan keutuhan ciptaan mesti diproklamasikan dan didemonstrasikan oleh gereja melalui keterlibatannya yang konstruktif, kreatif, realistis, dan kritis di negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Aritonang 2000, 98).

PARTIPASIPASI SEBAGAI TANGGUNG JAWAB

Dalam konteks keterlibatan Kristen dalam pemilihan dan pembangunan nasional Indonesia, Johannes Leimena juga ikut meletakkan dasar-dasar pemikiran yang teguh bagi keterlibatan gereja-gereja di Indonesia. Pada 1955, ketika Indonesia akan menggelar Pemilu pertama, Dewan Gereja-gereja di Indonesia (DGI) (yang kemudian berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, disingkat PGI) menggelar Konferensi Studi Pendidikan Agama Kristen di Sukabumi pada 20 Mei sampai 10 Juni 1955. Dalam konferensi itu, situasi aktual Indonesia turut diperbincangkan dan digumuli, dan Johannes Leimena diminta untuk memberikan pemikiran mengenai tanggung jawab Kristen dalam kehidupan politik kebangsaan Indonesia.

Makalah yang disajikan Leimena pada waktu itu berjudul *Kewarganegaraan Yang Bertanggung-jawab*. Leimena mengatakan bahwa warga negara adalah anggota tubuh negara. Artinya, seseorang tidak bisa dipisahkan dari negaranya, dan sebaliknya, negara tidak bisa dipisahkan dari anggota-

anggotanya. Menarik, bahwa Leimena memakai metafora tubuh atau badan untuk menggambarkan persekutuan hidup dalam negara. Tubuh yang lengkap terdiri dari mata, kaki, tangan, dan anggota-anggota yang lain yang terjalin secara organis. Tidak ada tubuh tanpa anggota-anggota tersebut. Demikian halnya dengan negara, merupakan sebuah kesatuan organis yang terdiri dari berbagai warga negara yang hidup di dalam satu persekutuan (*gemeenschap*) di wilayah atau teritori tertentu dan mempunyai pemerintah dengan kekuasaan, kewibawaan, dan alat-alat kekuasaan yang didasarkan pada hukum (Leimena 2007, 3-5).

Gambaran negara sebagai suatu badan organis itu mengingatkan kita akan ajaran Paulus mengenai gereja yang dilukiskan sebagai tubuh Kristus (1 Korintus 12:12-31). Satu tubuh, namun terdiri banyak anggota. Masing-masing anggota ini memiliki keunikan, namun yang satu tidak boleh mengatakan kepada yang lain bahwa ia lebih hebat. Setiap bagian atau anggota memiliki fungsi yang tertentu, dan bagian-bagian atau anggota-anggota itu berarti setia terhubung dengan yang lain dalam satu tubuh. Karena itu, kesatuan dan persatuan begitu dipentingkan. Seperti semboyan negara kita, Bhineka Tunggal Ika, biar berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dalam kesatuan itu, jika ada satu anggota yang menderita, maka semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, maka semua anggota turut bersukacita. Inilah arti hidup bersama sebagai satu kesatuan tubuh, di mana kesetaraan dan belas-rasa (*compassion*) dihayati dan sebagai bagian *elan vital* kehidupan. Tanpa hal-hal ini, maka gereja akan mati. Demikian juga dengan negara yang dilukiskan sebagai satu kesatuan organis. Cinta, kesetaraan, solidaritas dan tanggung jawab akan membuat negara menjadi penuh daya hidup.

Sebagai contoh, bila saudara-saudari kita di Asmat, Papua, mengalami busung lapar, maka kita semua dalam NKRI turut merasakan penderitaan mereka. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita juga. Dalam belarasa ini, kita tergerak untuk bersama-sama melepaskan saudara-saudari kita di Asmat dari busung lapar dan kemiskinan. Kita tidak bisa berdiam diri, sebab mereka adalah bagian dari kita. Orang Manado bilang, *"Torang samua basudara."* (Kita semua bersaudara). Orang Ambon mengatakan, *"Ale rasa, beta rasa."* (Apa yang Anda rasa, saya pun merasakannya). Orang Karo berkata, *"Aku kap kam, kam kap aku."* (Aku adalah kamu, kamu adalah aku). Masih banyak ungkapan lain dari seantero negeri ini yang artinya hampir sama: kita adalah saudara sepenanggungan. Karena itu, terhadap kenyataan busung lapar seperti yang terjadi di Asmat, atau pun dalam berbagai bencana alam dan bencana sosial di bumi Indonesia, kita semua terpanggil untuk ikut bertanggung jawab dalam menanggungnya.

Prinsip hidup yang demikian sejalan dengan pandangan kekristenan tentang hidup bermasyarakat seperti yang terdapat di dalam Matius 22:37-40 yang dikenal juga dengan nama Hukum Kasih:

KASIHILAH TUHAN ALLAHMU DENGAN SEGENAP HATIMU DAN DENGAN SEGENAP JIWAMU DAN DENGAN SEGENAP AKAL BUDIMU. ITULAH HUKUM YANG TERUTAMA DAN YANG PERTAMA. DAN HUKUM YANG KEDUA YANG SAMA DENGAN ITU, IALAH: KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI DIRIMU SENDIRI. PADA KEDUA HUKUM INILAH TERGANTUNG SELURUH HUKUM TAURAT DAN KITAB PARA NABI.

Persis dalam semangat dan prinsip hidup bermasyarakat yang seperti itu, Leimena merumuskan artinya menjadi

warga negara yang bertanggung jawab. Menurutnya, setiap warga negara bertanggungjawab atas maju dan mundurnya negara itu. Terhadap kemajuan negara, ia memuji pemerintah, terhadap kemunduran, ia memberikan kecaman dengan jalan-jalan dan saluran-saluran yang legal (Leimena 2002, 6). Hal ini bisa terjadi, menurutnya, jikalau kita memiliki keinsyafan kenegaraan atau kesadaran ke-bangsaan, bahwa kita adalah bagian dari organisme yang bernama Indonesia. Keinsyafan ini akan menolong kita untuk hidup secara bertanggung jawab.

Akan tetapi, pertanyaannya, bertanggung jawab kepada siapa? Secara rohani, kita bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Mahakuasa yang kita kenal di dalam Yesus Kristus; secara duniawi kita bertanggung jawab kepada negara dan bangsa. Kedua-duanya menyatu dalam diri dan mewujudkan dalam tindakan sesuai dengan hukum. Menurut Leimena, hukum seperti ini paling baik dijalankan dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi (Leimena 2007, 7). Pemikiran Leimena ini memberikan basis pemikiran teologi-sosial yang kuat bagi warga gereja sekaligus warga negara untuk terlibat dalam kenyataan hidup sehari-hari di berbagai bidang, termasuk di bidang politik. Bertolak dari pemikiran itulah ia mendorong gereja-gereja di tahun 1955 untuk ikut serta menyukseskan Pemilu, apalagi dengan mengingat bahwa pada masa itu kita masih bergumul untuk menyiapkan dasar negara yang tetap. Karena itu, Leimena mengungkapkan bahwa, "Melalaikan pemilihan umum berarti melalaikan tanggung jawab kita terhadap negara kita, yang dasar dan kehidupannya harus ditentukan oleh kita bersama, kaum Kristen dan bukan Kristen" (Leimena 2007, 20).

WUJUDKAN PEMILU DAMAI

Kini kita tidak lagi mempersoalkan dasar negara kita, kendati terdapat kelompok-kelompok kecil tertentu yang berupaya untuk mengganti dasar negara kita dengan ideologi lain. Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI adalah dasar dan pilar-pilar hidup bernegara yang sudah final. Tantangan bagi kita dewasa ini adalah bagaimana mewujudkan nilai-nilai yang terkandung di dalam dasar dan pilar-pilar hidup bernegara itu dalam kehidupan demi terwujudnya cita-cita nasional, yakni masyarakat yang adil, makmur, cerdas, dan disegani dalam pergaulan internasional.

Untuk merealisasikan cita-cita nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 itu, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin nasional dan daerah yang berintegritas, bertanggung jawab, cakap, dan transparan dalam menjalankan pemerintahan, serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat yang bertanggung jawab. Untuk itu, baik warga Kristen maupun umat beragama lain, mesti ikut serta dalam Pemilu, baik untuk memilih wakil-wakil rakyat baik di pusat maupun daerah. Partisipasi kita menentukan masa depan negara dan bangsa kita.

Indonesia adalah bangsa yang besar, kaya dengan beragam suku, adat, budaya, dan agama. Sebagai bangsa yang beragama dan manusia yang beriman, kita percaya bahwa kekayaan negara kita ini adalah anugerah dari Allah Pencipta. Dalam Mukadimah UUD 1945 dinyatakan bahwa berdirinya Indonesia sebagai negara-bangsa adalah berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Alkitab dalam kisah penciptaan di kitab Kejadian (pasal 1 dan 2) pun melukiskan dan meyakinkan kita bahwa

dunia dengan segala kekayaannya adalah baik di mata Allah. Ia melihat alam dan segala kekayaannya serta manusia yang diciptakan-Nya itu sungguh sangat baik. Dalam perspektif penciptaan ini, maka sudah tentu yang harus kita lakukan sebagai orang Indonesia adalah menghargai keanekaragaman Indonesia ini sebagai karunia Tuhan yang mesti disyukuri dan dipelihara.

Persoalannya, keanekaragaman atau perbedaan itu kerap kali dipolitisasi. Politisasi khususnya agama, membuat perbedaan yang awalnya adalah kekayaan berubah menjadi ancaman. Di dalam momen-momen Pemilu, baik di lingkup nasional atau pun daerah/lokal isu-isu SARA kerap dipolitisasi. Suku, agama, ras, dan golongan dipakai sebagai tunggangan elite politik untuk mendulang suara. Akibatnya, masyarakat terkotak-kotak. Persahabatan yang sebelumnya tidak dibatasi oleh embel-embel SARA, tiba-tiba menjadi renggang hanya karena berada di kubu politik yang berbeda. Hubungan-hubungan sosial pun memanas bahkan rentan konflik dan kekerasan.

Tantangan di atas semakin diperkuat dengan kehadiran media sosial. Pada masa-masa yang lalu, misalnya di zaman Orde Baru, masa-masa kampanye diisi melalui pengerahan massa dan orasi di lapangan-lapangan terbuka. Di masa kini, kampanye banyak dilakukan melalui media. Kontak fisik memang dibatasi dengan adanya penggunaan media sosial, akan tetapi emosi pemilih dan pengguna media sosial kerap kali diaduk-aduk dengan berbagai kampanye negatif. Karena itu, tensi ketegangan dan konflik tidak berkurang dengan adanya kampanye di dunia maya itu. Sebaliknya, ia menggumpal

sebagai potensi destruktif yang kapan saja bisa meledak di dunia nyata. Media sosial dapat menjadi sarana yang ampuh dan efektif untuk memobilisasi massa.

Karena itu, panggilan kita dalam keterlibatan di masa-masa Pemilu adalah menciptakan Pemilu damai. Pemilu damai bukan hanya Pemilu tanpa kekerasan. Tidak adanya kekerasan, seperti kekerasan verbal, psikologis, atau pun kekerasan fisik dapat kita jadikan sebagai salah satu indikator Pemilu damai. Pemilu damai tidak sekadar pemilu yang berlangsung tanpa konflik kekerasan tetapi berlangsung sesuai dengan hukum dan Undang-Undang.

Dalam perspektif Kristen, damai itu terkait dengan relasi yang mendalam dan hangat antara manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesama. Di tengah relasi intim itu manusia menemukan kekuatan dan ketenangan batin, sebab ada Allah dan sesama yang menyertainya. Kekuatan dan ketenangan itu pada gilirannya mewujudkan dalam gaya hidup sehari-hari. Artinya, damai itu menjadi *habitus* atau kebiasaan; sebuah tindakan aktif yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan dan perdamaian dalam kehidupan dengan sesama. Yesus Kristus dalam kotbah-Nya dibukit menyampaikan bahwa: *Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah* (Matius 5: 9).

Berdasarkan perspektif iman di atas, dapat dikatakan bahwa tantangan untuk mewujudkan Pemilu damai adalah implikasi kita sebagai anak-anak Allah. Artinya, pemilu damai yang hendak kita raih dalam hidup berdemokrasi sebagai bangsa adalah juga panggilan iman kita untuk menjadi seorang murid Yesus. Panggilan Yesus untuk membawa damai ini

memperteguh kita untuk turut serta menciptakan Pemilu damai.

Jika kita mengacu kepada UU Pemilu seperti yang telah dikutip dalam bab sebelumnya, disebutkan bahwa asas pemilu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk menjamin bahwa asas-asas ini dilakukan maka dibuatlah UU tentang kepemiluan dan berbagai aturan turunannya sebagai dasar hukum. Dengan demikian, Pemilu damai mesti dipahami dalam kerangka berpikir hukum tersebut yakni,

- 1. Bersifat langsung.** Hal ini berarti setiap warga negara yang berhak mengikuti Pemilu dapat secara langsung menggunakan haknya untuk memilih dengan datang ke TPS-TPS. Hak ini tidak diwakilkan atau diatasnamakan kepada orang lain. Secara esensial, Pemilu langsung ini berarti kedudukan warga negara dikukuhkan sebagai subjek, sehingga ia mesti terpanggil dan bertanggung jawab dengan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
- 2. Bersifat umum.** Artinya, hak dan kewajiban warga negara sebagai pemilih ini sama untuk semua. Warga atau pemilih tidak dibeda-bedakan ber-dasarkan jumlah mayoritas atau pun minoritas. Warga tidak diklasifikasi berdasarkan SARA untuk mengikuti atau menetapkan hak pilih, melainkan pe-milihan itu terbuka untuk semua warga negara sesuai dengan hukum atau UU. Bahkan, pelaksanaan Pemilu itu terbuka untuk dipantau oleh seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga terkait.
- 3. Bersifat bebas.** Artinya, pemilih menjalankan hak dan kewajibannya tanpa tekanan, paksaan, atau pun ancaman serta kekerasan dari pihak tertentu. Mereka bebas dari

berbagai tindakan manipulatif yang dilakukan untuk keuntungan pihak-pihak tertentu. Selain dimensi *bebas dari*, masyarakat dan pemilih juga *bebas untuk* meng-ungkapkan berbagai kecurangan yang terjadi demi perbaikan kualitas pemilu dan demokrasi.

4. **Bersifat rahasia.** Artinya, pemilihan yang dilakukan oleh pemilih di waktu pemilihan itu berlangsung tertutup. Dengan cara ini, maka hak dan kebebasan warga negara dilindungi. Tujuannya, supaya mereka terbebas dari dampak negatif dalam sebuah kontestasi Pemilihan Umum. Ketenangan dan kedamaian jua yang diharapkan dalam Pemilu dapat terwujud.
5. **Bersifat jujur.** Artinya, Pemilu dilakukan secara terbuka dan transparan. Prosesnya dapat diikuti dan diawasi oleh warga dan badan-badan pengawas Pemilu. Pemilu yang jujur bebas dari manipulasi, seperti manipulasi data pemilih atau pun penggelembungan suara. Bahkan, bebas juga dari upaya-upaya suap pihak tertentu untuk mendapatkan suara pemilih.
6. **Bersifat adil.** Hal ini berarti baik pemilih maupun para kandidat atau calon dan partai politik pengusung yang ikut berkontestasi dijamin hak dan kewajibannya sesuai dengan hukum yang adil. Tidak boleh ada keberpihakan dari penyelenggara atau pemantau pemilu kepada peserta atau calon tertentu. Hukum yang berlaku diterapkan secara sama untuk semua. Pihak pelaksana Pemilu, misalnya, tidak boleh menganakemaskan calon-calon tertentu.

Gereja bersama dengan warga gereja memiliki tanggung jawab untuk ikut serta mewujudkan pemilu damai. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat dilakukan oleh gereja dan warga gereja untuk menyukseskan Pemilu damai:

1. Secara kelembagaan, gereja-gereja perlu menjaga netralitasnya dalam politik praktis. Gereja dan para pendeta hendaknya tidak terlibat dalam kampanye atau dukung-mendukung satu pasangan calon tertentu dengan mengatasnamakan lembaga gereja. Gereja harus berdiri sebagai gembala di atas semua golongan dan kepentingan, sehingga suara gereja sebagai gembala memiliki kredibilitas secara moral dan politik, baik di internal gereja itu sendiri maupun dalam kaitan dengan institusi lain di dalam masyarakat.
2. Dalam kapasitas sebagai “gembala,” gereja sebagai sebuah lembaga rohani dapat mengeluarkan surat gembala atau surat pastoral untuk mendorong partisipasi warga gereja supaya aktif menyatakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Partisipasi ini merupakan wujud pertanggungjawaban setiap orang kepada negara dan Allah demi kepentingan bersama untuk jangka panjang.
3. Gereja secara kelembagaan seperti PGI atau Sinode-Sinode Gereja, dapat ikut memantau proses Pemilu, baik di daerah maupun nasional, dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu demi perbaikan-perbaikan sistem kepemiluan dan demokrasi di bangsa dan negara kita.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh warga gereja, antara lain:

1. Menggunakan hak dan kewajiban politiknya untuk memilih

atau pun dipilih. Memilih untuk tidak memilih (golput) bukanlah sebuah pilihan yang bertanggung jawab. Golput justru menyia-nyiaikan hak istimewa yang datang dari Allah dan dihormati oleh negara. Memilih memang bertujuan memenangkan pemimpin yang baik dan cakap, tetapi yang terutama adalah menghindarkan diri dari pemimpin yang “tidak baik”. Sebagai contoh, di suatu daerah terdapat dua paslon: (1) XX cukup baik dan (2) YY kurang baik. Masyarakat secara umum mengenal track record kedua paslon dan cenderung berpihak pada XX. Akan tetapi, pasca pemilihan didapati bahwa YY menang dan XX kalah. Mengapa? Menurut pengamatan Badan Pengawasan Pemilu, hal ini disebabkan banyaknya masyarakat yang mendukung XX tidak ikut memilih pada hari pencoblosan. Paslon YY yang sejak awal kurang didukung menjadi menang karena rata-rata pendukungnya datang dan memenangkan suara terbanyak. Oleh karena itu, untuk menghindari terpilihnya pemimpin yang dikenal kurang baik, setiap warga gereja yang memiliki hak pilih mesti datang dan mencoblos di TPS pada waktu yang ditentukan.

2. Terlibat dalam pengawasan Pemilu dengan menjadi relawan-relawan baik di TPS maupun dilembaga-lembaga pemantau Pemilu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan asas dan ketentuan yang berlaku.
3. Melakukan pengaduan kepada lembaga pemantau Pemilu seperti Bawaslu, apabila ditemukan adanya pelanggaran atau kecurangan dalam masa-masa kampanye atau saat pemilu berlangsung, baik yang dilakukan oleh pihak

penyelenggara maupun oleh pihak kontestan. Misalnya, aksi bagi-bagi uang, pemalsuan data, penyebaran berita bohong terkait paslon, intimidasi, politisasi isu SARA, dan lain-lain.

Hal-hal yang tampak sederhana namun penting untuk masa depan Indonesia itu dapat dilakukan oleh gereja dan warga gereja dalam relasi dan kerjasama dengan lembaga dan umat beragama lain. Setiap lembaga dan umat beragama yang ada di Indonesia tentu sama-sama menginginkan Pemilu damai. Kepentingan ini kiranya mempertemukan warga negara dari berbagai agama. Perjumpaan semakin memperteguh kita untuk melangkah bersama sebagai satu bangsa. Alhasil, Pemilu yang kita lakukan, baik di aras nasional maupun lokal, benar-benar menjadi perayaan demokrasi yang dijalani dengan penuh kegembiraan oleh seluruh anak bangsa, apa pun suku, agama, ras, atau golongan/partai politiknya, tanpa ancaman dan tanpa rasa takut.

MEWUJUDKAN DEMOKRASI YANG BERMARTABAT

Pemilu yang berlangsung damai sesuai dengan asas dan hukum yang berlaku niscaya akan menghasilkan pemimpin yang cakap, legitimaris, dan membawa bangsa kita pada kematangan ber-demokrasi. Salah satu indikasi kematangan dalam berdemokrasi adalah kemampuan menghargai perbedaan dan menerima hasil Pemilu dengan lapang dada. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontestasi dalam negara demokrasi pada akhirnya akan melahirkan pihak yang menang dan pihak yang kalah. Inilah fakta hidup berdemokrasi. Penerimaan terhadap fakta tersebut memungkinkan kita melangkah maju alias *move on*. Menang dalam Pemilu berarti mendapat kepercayaan masyarakat. Kepercayaan tersebut

adalah amanah yang mesti ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Sebaliknya, kalah dalam pemilihan berarti mendapatkan kesempatan untuk menjadi mitra masyarakat dan pemerintah untuk ikut mengawasi jalannya pemerintahan demi terciptanya kebaikan bersama, *bonum commune*. Menang atau kalah hanya soal “pergeseran” peran, posisi, dan tanggung jawab. Semua peran, posisi, dan tanggung jawab setiap orang pada dasarnya unik dan berarti. Menang atau kalah bukan segala-galanya dalam demokrasi.

Andreas A. Yewangoe, pendeta dari Gereja Kristen Sumba (GKS) yang juga mantan ketua Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), dalam acara *Prayer Leader Summit* yang dilaksanakan oleh Jaringan Doa Nasional (JDN), mengingatkan bahwa demokrasi bukan soal jumlah dan kemenangan, tetapi terutama menyangkut nilai kemanusiaan, keadaban, dan etika (Yewangoe 2018). Penerapan demokrasi secara substantif akan menolong warga negara untuk menjadi semakin manusiawi, di mana rakyat dapat hidup secara wajar dan bermartabat serta kebutuhan dan hak-hak dasarnya terpenuhi. Karena itu, demokrasi akan senantiasa menjunjung tinggi etika. Nilai-nilai dasar yang menjadi kebajikan, yang memberikan penerangan tentang yang benar dan yang salah atau pun yang baik dan yang buruk, ditempatkan sebagai penjaga keadaban publik. Alhasil, masyarakat hidup dengan tertib dan harmonis. Mereka tidak mudah untuk dipecah-belah oleh isu-isu dan sentimen primordial. Inilah yang kami sebut sebagai demokrasi yang bermartabat: demokrasi yang mengutamakan kemanusiaan, keadaban, dan etika. Demokrasi inilah yang harus terus kita perjuangkan.

Terselenggaranya Pemilu damai adalah bagian dari prosedur demokrasi yang akan mengantar kita pada demokrasi yang bermartabat. Karena itu, peran serta gereja dan warga gereja tidak boleh berhenti tatkala pesta demokrasi dalam pemilu berakhir. Gereja dan umat Kristiani justru harus terus mengawal jalannya pemerintahan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah yang terpilih. Tepat di sinilah peran gereja sebagai kekuatan moral dalam kehidupan bangsa dan negara. Secara kelembagaan, gereja dapat secara aktif terlibat untuk memberikan landasan etik-moral bagi proses-proses pembangunan. Bahkan, gereja tidak boleh sungkan untuk menyampaikan suara kenabian sebagai wujud dukungan, kala jalannya pemerintahan tidak lagi sesuai dengan hukum dan asas keadilan serta kemanusiaan.

Gereja dapat pula mempersiapkan warga gereja untuk menjadi warga negara yang rasional dan bertanggung jawab. Bahkan, secara kelembagaan gereja dapat mendorong warga gereja untuk terlibat dalam dunia politik praktis sebagai agen perubahan. Namun, keterlibatan warga gereja dalam politik bukan untuk memperjuangkan hak-hak hidup dan hak beribadat umat Kristiani semata. Visi kita adalah mewujudkan kebaikan bersama dalam negara demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Selain itu, gereja dan warga gereja dalam semangat demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 perlu menata relasi dan membangun kerjasama dengan lembaga dan umat agama lain. Umat dari agama lain adalah sesama peziarah dan pewaris negara Indonesia. Sebagai sesama peziarah, kita hanya hidup sementara di tengah dunia dan

bangsa kita. Namun, hidup yang sementara itu memiliki makna dan panggilan untuk menegakkan nilai-nilai kebajikan, kebenaran dan keadilan, agar nantinya kita dapat mewariskan Indonesia yang damai dan bermartabat kepada anak-cucu kita. Kita telah mewarisi negara yang kaya dan besar ini dari para pendiri bangsa dan pendahulu kita, maka mari kita mewariskan kekayaan dan kebesaran Indonesia kepada penerus negara dan bangsa tercinta ini.

BAB 03

YESUS ADALAH TELADAN BAGAIMANA SEORANG PEMIMPIN HIDUP DEMI KEBENARAN DAN PELAYANAN ORANG BANYAK TERUTAMA BAGI ORANG-ORANG MISKIN, KESEPIAN, SAKIT, DAN DIPINGGIRKAN OLEH MASYARAKATNYA.

MEMILIH PEMIMPIN YANG NEGARAWAN DAN POLITISI BERINTEGRITAS

PEMIMPIN NEGARAWAN DAN POLITISI BERINTEGRITAS

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹ mendefinisikan negarawan sebagai orang yang ahli dalam soal-soal kenegaraan; ahli dalam menjalankan negara (pemerintah); pemimpin politik yang secara taat asas menyusun kebijakan negara dengan suatu pandangan ke depan atau mengelola masalah kenegaraan dengan kebijaksanaan dan kewibawaan.

Definisi ini menggaris bawahi bahwa negarawan adalah orang-orang yang berpengetahuan dan mengabdikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar daripada dirinya, keluarganya, kelompoknya, yakni kepentingan negara dan rakyatnya. Mereka menjunjung tinggi etika dalam melayani dan memimpin. Pantang bagi seorang negarawan untuk mengkhianati kebenaran. Socrates, bapak filsafat dari Yunani kuno, merupakan teladan baik tentang menegakkan kebenaran kendati nyawanya menjadi taruhan. Socrates tidak hanya mengajarkan tentang kebenaran, tetapi ia sendiri rela dihukum mati dengan meminum racun demi membela kebenaran. Bagi Socrates, lebih baik mati karena kebenaran, daripada hidup

1 KBBI edisi IV Badan Bahasa

dengan melecehkan dan membungkam kebenaran. Teks-teks Alkitab pun banyak menekankan pentingnya menegakkan kebenaran atau menjadi orang yang hidup dalam kebenaran.

“KEBENARAN MENINGGIKAN DERAJAT BANGSA, TETAPI DOSA ADALAH NODA BANGSA” (AMSAL 14: 34).

“ORANG YANG HIDUP DALAM KEBENARAN, YANG BERBICARA DENGAN JUJUR, YANG MENOLAK UNTUNG HASIL PEMERASAN, YANG MENGEBASKAN TANGANNYA, SUPAYA JANGAN MENERIMA SUAP, YANG MENUTUP TELINGANYA, SUPAYA JANGAN MENDENGARKAN RENCANA PENUMPAHAN DARAH, YANG MENUTUP MATANYA, SUPAYA JANGAN MELIHAT KEJAHATAN, DIALAH SEPERTI ORANG YANG TINGGAL AMAN DI TEMPAT-TEMPAT TINGGI, BENTENGNYA IALAH KUBU DI ATAS BUKIT BATU; ROTINYA DISEDIAKAN AIR MINUMNYA TERJAMIN” (YESAYA 53: 15-16).

Alkitab juga menekankan kepemimpinan adalah pelayanan demi kemaslahatan rakyat. Yesus adalah teladan bagaimana seorang pemimpin hidup demi kebenaran dan pelayanan orang banyak terutama bagi orang-orang miskin, kesepian, sakit, dan dipinggirkan oleh masyarakatnya. Ia datang untuk menyelamatkan umat manusia dan duniaserta memberikan teladan bagaimana hidup di dalam kebenaran. Irela mati disalib karena kebenaran dan keselamatan umat manusia. Meski mati di kayu salib, pada akhirnya kebenaranlah yang menang dan kebangkitan Yesus Kristus menjadi jaminannya.

Karena itu, gereja yang hidup dan melayani hari ini mesti terus berjuang bersama umat beragama lain untuk memastikan kebenaran dan keadilan ditegakkan, manusia dimuliakan serta dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Johannes Leimena mengatakan, politik bukan alat untuk meraih kekuasaan namun etika untuk melayani.

Diskursus di atas menunjukkan, seorang negarawan memiliki semangat pengabdian dan kerelaan berkorbandemi kemaslahatanrakyat dan bangsanya. Semangat negarawan ini sejalan dengan semangat politisi (sejati) sebagaimana dibahas sebelumnya. Arti dan makna negarawan dan politisi sejati ini mengasumsikan fungsi-fungsi dasar kepemimpinan.

Pemimpin dan kepemimpinan bukanlah kata benda, melainkan kata kerja. Pemimpin dan kepemimpinan itu pertama-tama menerangkan fungsi, bukan status, jabatan atau kedudukan, seperti yang dicontohkan oleh Yesus Kristus. Yesus berkata: *"Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang"* (Matius 20:28; Markus 10: 45). Yesus adalah Allah yang mau mengosongkan dirinya (*kenosis*) dan menjadi sama dengan manusia. Ia tidak menganggap kedudukan-Nya sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan merendahkan diri dan melayani umat manusia. Contoh konkret dari sikap kerendahan hati dari Yesus tampak dalam tindakan-Nya membasuh kaki murid-murid-Nya. Inilah teladan kepemimpinan Kristiani, yakni pemimpin yang melayani (*servanthood leadership*).

Pertanyaannya: Apakah jabatan atau kedudukan tertentu

saja yang dapat disebut pemimpin? Dalam pengertian klasik dan sederhana, pemimpin adalah orang yang berpengaruh dan selalu menjadi contoh. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh kepada pengikutnya untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan bersama. Mengacu kepada definisi ini, maka pemimpin itu dapat mencakup **pemimpin formal** maupun **pemimpin nonformal**. Pemimpin formal berada dalam instansi dan atau organisasi tertentu, misalnya di ranah negara disebut presiden dan wakil presiden, gubernur, bupati, walikota dan para legislator, sedangkan instansi swasta disebut direktur, koordinator, kepala sekolah, dan sebagainya. Sedangkan pemimpin nonformal adalah warga yang dihormati, jasa dan teladannya diakui masyarakat, serta dijadikan tokoh panutan. Karena itu, warga negara “biasa” juga dapat menjadi pemimpin nonformal yang mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan masyarakat, misalnya suaranya didengar atau saran-sarannya diminta dalam menghadapi kasus atau pilihan tertentu.

Dalam banyak kasus, sering pemimpin terpilih ternyata tidak memiliki kapasitas memimpin dan tak layak menjadi contoh, malah memberikan pengaruh buruk. Pemimpin ini tidak mengedepankan tujuan bersama, tetapi kepentingan diri dan kelompok yang diprioritaskan. Suara mereka omong kosong, melecehkan nalar sehat, dan membingungkan masyarakat. Kinerja dan prestasi mereka tak ada, tetapi rajin *cuap-cuap* sembarangan di media sosial atau media massa. Ada pula yang tak setia melakukan tugasnya dan mangkir dari tanggung jawab. Pemimpin seperti ini dapat kita temui dalam berbagai bidang kehidupan. Menyikapi pemimpin-pemimpin seperti ini warga gereja bertanggung jawab mengkritik dan menegur

mereka. Bahkan, pemimpin-pemimpin jenis ini dapat dicegah untuk terpilih apabila warga bersama-sama berpartisipasi dalam Pemilu, bukan pesimis atau apatis.

Memilih Pemimpin yang Negarawan dan Politisi Berintegritas

Apa sajakah kriteria yang menjadi patokan warga negara dalam memilih pemimpin di pemerintahan baik pusat atau daerah? Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu memahami lebih lanjut mengenai pemimpin negarawan dan politisi berintegritas.

Ada kualifikasi-kualifikasi umum yang disematkan kepada pemimpin yang negarawan dan politisi berintegritas. Tentu saja, kualifikasi-kualifikasi ini jauh dari primordialisme, misalnya memilih pemimpin hanya karena memiliki kesamaan agama atau suku. Janji-janji manis tentang kemajuan dan keuntungan secara ekonomis juga tak masuk sebagai ukuran atau kriteria.

Empat kualifikasi negarawan dan politisi berintegritas tersebut adalah:

■ Berintegritas

Pemimpin berintegritas adalah pemimpin yang memiliki keselarasan kata dan perbuatan. Istilahnya: walk the talk atau konsisten. Konsistensi penting mendapat perhatian, terlebih bagi mereka yang menyanggah status pemimpin. Pemimpin akan dinilai sebagai pribadi yang berkarakter baik bila ia memegang teguh prinsip moral, etika, kebijakan, dan hukum dalam berbagai situasi dan tekanan. Apa pun situasi dan kondisi, pribadi yang berkarakter akan tetap berpedoman pada nilai-nilai moral, kebijakan dan aturan-peraturan. Ia tidak

gampang dipengaruhi oleh uang dan dihasutoleh pihak-pihak tertentu. Apalagi didorong oleh hasrat dan ambisi pragmatis jangka pendek.

Konsistensi mensyaratkan totalitas. Dalam terminologi Kristen, totalitas ini dapat digambarkan sebagai penyerahan atau pemberian diri yang penuh dan utuh. Tidak ada lagi sisa ruang dalam dirinya untuk berkompromi dan ber-transaksi demi keuntungan diri sendiri. Segala ruang itu sudah diisi oleh kehendak-Nya. Hal ini tergambar misal-nya dalam pengalaman Daniel. Sekalipun ia muda, memiliki kesempatan untuk menikmati indahnya kehidupan istana, namun ia tidak mau memanfaatkan kondisi tersebut untuk kesenangan pribadi dengan mengorbankan keyakinan dan konsistensinya menjalankan ke-benaran yang ia percaya. Ia menjaga satunya keyakinan dan tindakan, sehingga Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang melalui pemimpin pegawai istana (Daniel 1: 9).

Sosok lain adalah Yesus Kristus sendiri. Ketika Ia bergumul hebat di Getsemani dengan pilihan untuk meneruskan panggilan, apakah yang Ia lakukan: menyerah atau berserah? Berhenti atau kah lanjutkan? Yesus konsisten. Apa yang diucapkan, itulah yang Ia lakukan. Yesus menunaikan tugas-Nya sampai akhir, dan Bapa memuliakan Dia.

Mengacu kepada teladan Daniel dan Yesus, maka integritas yang konsisten merupakan syarat yang harus dipenuhi warga gereja yang menjadi pemimpin atau memilih pemimpin. Banyak godaan tatkala seseorang menduduki jabatan publik, mulai dari melanggengkan kekuasaan melalui korupsi, kolusi dan nepotisme hingga gaya hidup mewah

dengan memanfaatkan fasilitas dan akses yang dimiliki. Sebaliknya, sebagai pemilih, politik uang dan janji-janji manis merupakan godaan tersendiri.

Dalam konteks Indonesia yang majemuk, salah satu konsistensi yang mesti tergambar dari para calon pemimpin adalah komitmennya untuk menjaga dan mengawal Pancasila dan UUD 1945 sebagai Konstitusi berbangsa dan bernegaradan mengamalkannya dalam program, kebijakan, dan kehidupan sehari-hari.

■ **Kapabilitas atau cakup memimpin**

Negara sebesar Indonesia tidak hanya membutuhkan orang-orang baik, juga orang-orang berkompetensi atau berkemampuan memecahkan berbagai persoalan bangsa seperti korupsi, ke-miskinan, narkoba, hoaks, radikalisme, dan kerusakan lingkungan yang menjauhkan bangsa ini dalam mencapai cita-cita bersama yaitu negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Alkitab mengatakan: "Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang yang hina" (Amsal 22:29). Artinya, kecakapan atau kapabilitas dibutuhkan agar sebuah bangsa dapat hidup dengan terhormat. "Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya" (Amsal 29: 4).

Kapabilitas atau kemampuan para calon itu antara lain tergambar di dalam visi-misi, strategi, dan program-program terukur yang ditawarkan kepada masyarakat. Visi-misi, kebijakan, strategi dan program-program tersebut perlu dicatat dan diingat para pemilih untuk mengukur ingetritis atau konsistensinya. Para pemilih perlu mengkritik visi-misi,

strategi, kebijakan, dan program-program yang ditawarkan. Apakah program-program tersebut realitis, menjawab kebutuhan prioritas masyarakat, dapat dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan? Ataukah sebatas slogan atau janji-janji kosong? Dalam masa-masa kampanye, janji-janji para kontestan mesti diperiksa, ditimbang dan dinilai secara kritis oleh masyarakat, termasuk gereja dan warga gereja. Sebab, dewasa ini janji-janji itu dapat dirangkai hanya dalam waktu semalam, dikemas secara menarik dan asyik ditonton melalui youtube, atau dalam bentuk animasi, meme, pamflet, baliho, dan iklan-iklan media sosial dan media massa.

Penyampaian visi-misi, strategi, kebijakan, dan program-program yang terukur itu dapat dijadikan sebagai patokan untuk menilai apakah seseorang itu sudah siap atau belum untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin yang melayani masyarakat. Janji selama kampanye ini dapat dijadikan sebagai bagian dari “kontrak komitmen politik”, bahwa hal-hal itulah yang kelak akan mereka lakukan apabila mendapat kepercayaan dari masyarakat pemilih. Melalui “kontrak komitmen politik” itu masyarakat kelak dapat melakukan kontrol dan evaluasi atas kepemimpinan yang terpilih. Karena itu, pelajarilah setiap visi-misi, strategi, kebijakan, dan program-program terukur yang ditawarkan sebelum menjatuhkan pilihan terhadap calon atau pasangan calon tertentu.

Kapabilitas seorang pemimpin juga tampak dari kebijaksanaannya dalam merangkul kelompok atau golongan dalam masyarakat dengan latar belakang agama, suku, ras, gender, dan pilihan politik yang berbeda. Pemimpin mumpuni

adalah pemimpin semua golongan, bukan pemimpin kelompok atau agama tertentu!

■ **Akuntabel atau bertanggungjawab**

Seorang pemimpin haruslah seseorang yang kata dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggung jawaban seorang pemimpin dalam konteks pemimpin negara atau daerah selalu bersifat publik. Karena itu, pertanggung jawaban pemimpin mesti transparan dan dapat diakses oleh publik secara luas. Akuntabilitas dan transparansi ini menjadi syarat *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Jika kita ingin agar pemerintahan di Republik ini berjalan dengan baik, akuntabilitas dan transparansi mesti menjadi kriteria atau tolok ukur dalam memilih pemimpin. Pastikan bahwa pemimpin yang akan dipilih adalah sosok yang akuntabel. Jangan sampai kita memilih sosok pemimpin seperti Pilatus. Kisah Pilatus yang mencuci tangan dalam proses pengadilan Yesus (Matius 27: 24) merupakan contoh pemimpin yang tidak akuntabel. Setelah melalui proses pengadilan, Pilatus mendapati sama sekali tak satu pun ada kesalahannya. Namun desakan suara massa agar Yesus dihukum, membuat Pilatus kehilangan nyali. Ia memilih jalan aman dan menyelamatkan posisinya. Ia cuci tangan, membebaskan diri dari tanggung jawab. Padahal, sebagai pemerintah di wilayah itu, Pilatus adalah penanggung jawab situasi dan proses pengadilan yang terjadi. Kasus Pilatus ribuan tahun lalu itu, sampai kini masih sering terulang. Masyarakat sering dikecewakan oleh perilaku pemimpin yang suka cuci tangan. Karena itu, barometer akuntabilitas ini sungguh-sungguh

harus dipegang warga masyarakat pemilih termasuk warga gereja.

■ Rekam jejak yang baik

Lantas, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sosok pemimpin yang akan dipilih adalah sosok yang akuntabel, yang kata dan perbuatannya bisa dipegang, transparan, dan mampu mempertanggung jawabkan kinerjanya untuk kesejahteraan rakyat?

Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu menelusuri rekam jejak (*track record*) setiap calon atau kandidat. Di era digital ini, lebih mudah mengakses informasi tentang calon. Kita dapat mengumpulkan sebanyak mungkin informasi terkait rekam jejak para kandidat di aras lokal atau daerah, regional, nasional maupun internasional. Jejak-jejak itu dapat me-nuturkan kepada kita, apakah mereka adalah orang-orang yang berintegritas, kapabel, akuntabel, mampu bekerja secara cerdas dan jujur bersama dan bagi banyak orang tanpa memandang SARA. Semua ini menyajikan data hidup tentang para kandidat meski kita juga perlu berhati-hati dalam menggali informasi.

Pihak penyelenggara Pemilu biasanya menyediakan data resmi terkait para kandidat. Kita dapat mengakses dan menelaahnya sendiri untuk pertimbangan pribadi. Tetapi kita juga dapat mencari informasi tambahan dari berbagai sumber seperti media massa, baik cetak maupun daring (*online*). Kita dapat memanfaatkan media-media yang ada untuk mengumpulkan informasi seputar para calon, khususnya melihat kinerja mereka dalam pelayanan publik. Sebagai warganet, tentu saja kita juga mesti selektif dan kritis dalam

memanfaatkan informasi dari media konvensional maupun internet.

“Inga-Inga!”

Ungkapan “inga-inga!” atau “ingat-ingat!” ini untuk mengingatkan kembali gereja dan warga gereja untuk giat berpartisipasi. Partisipasi itu dapat ditempuh melalui langkah

APIT:

A=Amati. Ikuti dan amati proses pemilu sejak masa kampanye. Simak dan teliti rekam jejak, visi-misi serta program-program kandidat.

P= Pilih. Gunakan hak pilih di hari pemilihan. Kita tidak boleh tidak memilih. Memilih untuk tidak memilih (golput) justru memberi peluang terpilihnya pemimpin dengan rekam jejak yang lebih buruk. Memilih orang baik itu bagus. Tetapi mencegah agar orang jahat tidak terpilih adalah penting. Karena itu, gunakan hak pilih Anda.

I = Ikuti. Pasca pemilihan jalannya pemerintahan harus dikontrol agar kita ikut memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan janji kampanye dan hukum yang berlaku.

T =Tagih. Kita berhak menagih janji bila dalam proses kehidupan pasca pemilu pemerintahan berlangsung tidak sesuai dengan harapan.

Langkah APIT merupakan wujud partisipasi sebagai hak

dan tanggung jawab gereja dalam pilkada atau pemilu. Sebagai prosedur demokrasi, pemilu membutuhkan biaya yang mahal. Anggaran untuk pembiayaan pemilu menggunakan dana-dana masyarakat yang diambil melalui pajak. Ketika kita tidak menjalankan hak dan kewajiban kita untuk memilih, maka sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan banyak hal: hak suara, uang, waktu, tenaga, masa depan, dan lain-lain. Jadilah saksi dan pelaku sejarah dalam upaya perbaikan dan penegakan demokrasi di bangsa kita. Mari kita wujudkan pemilu damai dan demokrasi yang bermartabat. *Inga-inga!*

BAB 04 —

SETIAP ORANG, TERMASUK UMAT KRISTEN, BERCERMIN PADA ETIKA UNTUK TINDAKAN DAN KEPUTUSANNYA. ETIKA ADALAH PENGAMBILAN KEPUTUSAN ETIS SESUAI DENGAN NILAI-NILAI MORAL.

ETIKA KRISTEN DAN KEPEMILUAN

Setiap orang, termasuk umat Kristen, bercermin pada etika untuk tindakan dan ke-putusannya. Etika adalah pengambilan keputusan etis sesuai dengan nilai-nilai moral.

Etika Kristen dapat dijadikan landasan mengukur perilaku dan tindakan orang lain. Tentu saja, bukan berarti menjadikan etika Kristen sebagai pedoman hidup seantero bangsa dan duniamelainkan mengambil nilai-nilai hidup universal sebagai pedoman kehidupan bersama. Etika Kristen tidak bertentangan dengan nilai-nilai keluhuran sehingga bersifat universal. Sebagai contoh, ajaran Yesus agar mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri (Matius 22: 39) berlaku tak hanya bagi orang Kristen, juga bisa diterima oleh umat beragama lain. Yesus (Matius 7: 12) dan Buddha mengatakan hal yang sama: *Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.*

Terkait Pilkada dan Pemilu, ada prinsip yang harus dipegang erat dan dijalankan sebagai etika Kristen.

KATAKAN TIDAK PADA UANG

Dalam kehidupan berdemokrasi, hak memilih atau hak suara dan hak untuk dipilih merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak ini tercantum dalam UUD 1945 (tentang hak untuk memilih Pasal 1 ayat 2, Pasal 2 ayat 1, Pasal 6A ayat 1, Pasal 19 ayat 1, Pasal 22C ayat 1; hak untuk dipilih Pasal 27 ayat 1, 2, Pasal 28, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28E ayat 3) karena

itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara dan merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara. Itu sebabnya hak ini mesti diperjuangkan sebagai penghormatan akan Allah, dan merupakan satu-satunya hak suara yang tidak dapat diwakilkan. Hak suara menjadi esensi partisipasi orang Kristen sebagai warga negara. Karena itu, pakailah hak suara dengan sebaik-baiknya.

Masa kampanye merupakan proses pengujian keteguhan hati para paslon. Mereka tidak jarang melakukan berbagai cara untuk mendulang suara. Salah satu di antaranya adalah *bagi-bagi uang*. Tindakan ini jelas melawan undang-undang.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana perubahan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada mengatur sanksi pidana bagi pihak manapun yang menjalankan praktik politik uang. Pasal 187A berisi:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UNDANG-UNDANG INI MENINDAK SECARA TEGAS BAIK PASLON YANG MEMBAGI-BAGIKAN UANG MAUPUN PEMILIH YANG MENERIMA UANG DARI PASLON. KARENA ITU, APABILA WARGA MASYARAKAT MENGETAHUI PENYIMPANGAN TERSEBUT, IA WAJIB MELAPORKANNYA KEPADA PIHAK BERWAJIB SEPERTI BAWASLU DAN TIDAK TERLIBAT DALAM POLITIK UANG TERSEBUT.

Di pihak lain, politik uang merupakan proses pengujian keteguhan hati para pemilih. Bawaslu mengamati, setidaknya ada empat level masyarakat menyikapi politik uang. *Pertama*, level sangat rendah. Masyarakat pada level ini tergolong kurang cerdas karena menerima uang dari paslon tertentu dan memilihnya pada saat pencoblosan. Bayangkan betapa berbahayanya proses demokrasi seperti ini. Hak suara diperjualbelikan, nasib bangsa dipertaruhkan. *Kedua*, level rendah. Masyarakat pada level ini sedikit lebih cerdas karena menerima uang paslon tetapi tidak memilih paslon terkait. Tetapi cara ini juga tidak baik sebab tetap akan melanggengkan politik uang dan melatih diri untuk menipu. *Ketiga*, level sedang. Masyarakat pada level ini tergolong cerdas karena menolak uang dari paslon dan tidak memilih paslon terkait. Walaupun demikian, cara ini juga bisa merugikan. Misalnya, dalam satu kontestasi Pilkada dua atau tiga paslon terbukti melakukan aksi *bagi-bagi uang*, masyarakat pada level ini otomatis

akan tidak memilih paslon manapun karena ketiga-tiganya melakukan politik uang. Alhasil, ia akan golput dan itu berarti tidak menggunakan hak suaranya dengan baik. *Keempat*, level tinggi. Masyarakat pada level ini tergolong sangat cerdas karena “menerima” uang dari paslon dan melaporkan paslon terkait ke pihak berwajib seperti Bawaslu. Penting dicatat, menerima di sini bukan berarti menyetujui tindakan politik uang paslon, sebaliknya, menerima untuk dijadikan barang bukti kepada Bawaslu. Setiap warga perlu waspada, jangan sampai berubah pikiran dan berpindah level-level masyarakat yang lebih rendah.

Menurut pengamatan kami, sebagian besar warga termasuk gereja mengakui bahwa *money politic* tidak benar di mata hukum negara maupun agama. Sayangnya, pengakuan ini tidak dibarengi kesadaran bahwa sudah/sedang terjadi *money politic* oleh paslon tertentu di kalangan umat/warga jemaat. Bansos yang diterima dari paslon dipandang sebagai “berkat”. Di tempat lain, paslon menggunakan cara-cara halus memberikan bansos, misal, melalui persembahan atau ucapan syukur. Tentu saja, “persembahan” tersebut diberikan menjelang pemilihan. Bansos atau “persembahan” pada gilirannya dielutukan sebagai bentuk perhatian paslon terhadap jemaat, dan hasilnya warga jemaat akan memberikan suaranya kepada paslon bersangkutan. Tanpa disadari, hak suara warga jemaat sudah dibeli oleh paslon. Warga jemaat harus lebih kritis, mengapa paslon memberi sumbangan, persembahan, atau lain-lain tepat menjelang pemilihan? Mengapa paslon meminta jemaat untuk mendukung paslon terkait dalam pemilihan? Bukankah ini merupakan jual-beli hak suara atau lebih jauh, penyuapan?

Pemberian bansos seperti di atas sejatinya sama dengan penyuapan. Mengapa? Ketika satu gereja diberi atau dijanjikan bansos oleh salah satu paslon sambil diminta mendukung atau memberikan suara pada Pemilu atau Pilkada, maka ini sama dengan suap: melakukan sesuatu karena bayaran. Alkitab berulang kali memperingatkan agar jemaat tidak menerima atau melakukan suap. Dalam Keluaran 23:8 dengan tegas dikatakan bahwa Allah tidak menerima suap :

“SEBAB TUHAN, ALLAHMULAH ALLAH SEGALA ALLAH DAN TUHAN SEGALA TUHAN, ALLAH YANG BESAR, KUAT DAN DAHSYAT, YANG TIDAK MEMANDANG BULU ATAUPUN MENERIMA SUAP.”

Hal senada dinyatakan dalam 2 Tawarikh 19:7 yang berbunyi:

SEBAB ITU, KIRANYA KAMU DILIPUTI OLEH RASA TAKUT KEPADA TUHAN. BERTINDAKLAH DENGAN SEKSAMA, KARENA BERLAKU CURANG, MEMIHAK ATAUPUN MENERIMA SUAP TIDAK ADA PADA TUHAN, ALLAH KITA.

Allah menolak suap baik terhadap diri-Nya maupun di antara sesama manusia. Suap membuat mata menjadi “buta”, tidak adil, tidak jujur, dan tidak takut akan Allah.

“JANGANLAH MEMUTAR BALIKKAN KEADILAN, JANGANLAH MEMANDANG BULU DAN JANGANLAH MENERIMA SUAP, SEBAB SUAP MEMBUAT BUTA MATA ORANG-ORANG BIJAKSANA DAN MEMUTARBALIKKAN PERKATAAN ORANG-ORANG YANG BENAR”

(Ulangan 16:19 bdk. Ulangan 27:25; 1 Samuel 8:3).

Karena itu, setiap orang mesti menjauhkan dirinya dari suap. Jemaat mesti mampu bersikap kritis terhadap segala bantuan atau “persembahan” yang diberikan oleh paslon di gerejanya. Sudah saatnya umat berkata tidak pada uang. Menerima uang dari paslon berarti sedang mempertaruhkan hak istimewa yang diberikan Allah padanya: hak suara. Karena itu, warga jemaat mesti berani berkata tidak pada uang, apa pun bentuknya.

TIDAK MAIN SARA

Persoalan lain dalam pilkada atau pemilu adalah politisasi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para politisi dengan sengaja menggembar-gemborkan perbedaan SARA untuk membakar emosi primordial para pemilih. Politisasi SARA kemudian berubah menjadi politik emosi. Warga lama kelamaan terpengaruh oleh permainan licik para politisi ini. Rasa satu suku, satu agama, satu ras, dan satu golongan terbangun secara membabi buta, dan akhirnya memobilisasi dukungan terhadap paslon terkait. Tentu saja, ini memperkecil kemungkinan masyarakat menyimak dan mempertimbangkan integritas, akuntabilitas, dan kredibilitas paslon. Padahal, pertimbangan ini penting untuk menguji kelayakan paslon menjadi pemimpin.

Tidak dapat dipastikan mengapa politisasi SARA berhasil mendulang suara. Sebagian orang berpendapat bahwa di daerah-daerah perkotaan isu SARA bukan lagi persoalan yang mengganggu jalannya proses demokrasi. Di berbagai tempat juga sering didengungkan jargon “Putra Daerah” atau “Kaum Pribumi” yang terkandung dalam ungkapan *halak kita* atau *kalak kita* (bahasa Batak Toba dan Karo, artinya *orang kita*).

Ungkapan-ungkapan ini menegaskan bahwa mereka layak dipilih karena *asli* berasal dari daerah tersebut. Warga yang bijak melihat Indonesia Raya dalam semangat persatuan dan kebhinnekaan dan bukan primordialisme. Partisipasi seseorang dalam pemilihan adalah wujud tanggung jawabnya sebagai warga negara. Pemilihan dilakukan bukan untuk kebaikan diri pribadi, keluarga, kelompok, sukudan agama melainkan bangsa dan negara. Pemilihan yang dilakukan juga bukan atas nama diri, keluarga, kelompok dan suku melainkan bangsa. Itu sebab, kurang tepat apabila seseorang memilih karena semangat primordialisme. Seseorang memilih dalam kapasitasnya sebagai warga negara.

Warga gereja kerap kali dipolitisir sebagai kaum minoritas, anak tiri, dan lain sebagainya. Semua istilah ini perlu dianalisis ulang sebab di hadapan hukum dan Tuhan semua orang berkedudukan sama. Semua adalah anak-anak Allah, semua adalah warga negaradanseluruh (pemilih) memiliki hak suara. Pemilihan kepala daerah atau negara tidak dapat dibatasi oleh SARA, sebaliknya diperluas oleh kebhinnekaan.

Jika diamati lebih dalam, politisasi SARA terjadi di lahan subur isu SARA. Para politisi tentu sudah mempelajari situasi daerah tersebut sebelum memilih cara ini dan memperhitungkan hasilnya. Karena itu, menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019, setiap orang di setiap daerah mesti waspada terhadap situasi dan kondisi di daerahnya. Gereja perlu mempelajari peluang isu yang mungkin dipolitisasi oleh paslon di daerahnya dan membekali warga jemaat agar semakin kritis menghadapi isu-isu yang tiba-tiba merebak menjelang pemilihan.

BIJAK BERMEDIA

Penyebaran informasi dan berita di era digital berlangsung dalam kecepatan suara dan waktu riil. Kini adalah era banjir informasi di mana seseorang merasa terkucil bila tidak mengikuti informasi atau berita atau isu-isu yang bergulir di media massa. Banjir informasi menuntut kita untuk memilah berita palsu atau bohong dengan berita sebenarnya, mana fakta dan mana fiksi. Sebagian orang, terlebih *buzzer* dan paslon, bahkan sengaja memproduksi informasi palsu atau hoaks sebagai bagian dari kampanye demi kepentingan kelompoknya.

Bila seseorang dapat membedakan manakah berita palsu, bohong, dan benar, ia dapat memberi penilaian yang objektif terhadap paslon-paslon terkait. Ia juga tidak mudah dipolitisir oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Paslon sekalipun kadang terseret tindak penyebaran berita palsu atau berita bohong, baik terkait dirinya maupun tentang paslon lain. Tentu saja, ini dilakukan untuk menarik simpati dan mendulang suara dari masyarakat pemilih.

Pemilih atau paslon Kristen yang akan dipilih sebaiknya mempertimbangkan perilaku etis ini. Yesus dalam kotbah-Nya di bukit mengingatkan para murid untuk tetap teguh menyatakan kebenaran:

JIKA YA, HENDAKLAH KAMU KATAKAN: YA, JIKA TIDAK, HENDAKLAH KAMU KATAKAN: TIDAK. APA YANG LEBIH DARI PADA ITU BERASAL DARI SI JAHAT (MATIUS 5:37).

Sebagai warganet, orang Kristen perlu mempertimbangkan perilaku etis Yesus ini. Kita tidak dapat melebih-lebihkan sesuatu atau menciptakan berita bohong. Sebaliknya, kita mesti menjaga integritas kita sebagai umat Allah. Di mana pun dan kapan pun kita diperintahkan untuk menyatakan kebenaran.

Sebagai pengguna media sosial dan internet, warga jemaat mesti bijaksana. Kecanduan gawai (*gadget*) memengaruhi penyebarluasan informasi dan berita. Selain *games*, masyarakat zaman *now* sibuk mengakses berita melalui ponselnya. Semua orang menjadi haus dan lapar luar biasa akan informasi dan berita. Manusia mengakses internet nyaris setiap detik. Banyaknya sumber kadang kala membuat kita sulit membedakan mana informasi yang benar dan bohong. Ironisnya, cukup banyak warganet menyebarkan berita yang diperoleh tanpa terlebih dahulu melakukan cek dan ricek. Berita yang belum teruji kebenarannya itu tersebar semakin luas dan mempengaruhi opini publik.

Warganet juga perlu menyadari rambu-rambu hukum dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) No. 11 tahun 2008 yang melarang penyebarluasan berita bohong, hoaks dan ujaran kebencian:

SETIAP ORANG YANG DENGAN SENGAJA DAN ATAU TANPA HAK MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN, ANCAMANNYA BISA TERKENA PIDDANA MAKSIMAL ENAM TAHUN DAN DENDAM MAKSIMAL RP. 1 MILYAR (PASAL 28 AYAT 1)

atau

SETIAP ORANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN SARA (PASAL 28 AYAT 2).

Kendati ada UU ITE, literasi digital menjadi kebutuhan penting warganet agar menjadi pengguna media sosial dan internet yang waspada, kritis dan aktif yang mampu memilah hoaks, berita palsu dan berita bohong. Juga memberantas penyebarluasan hoaks dengan melaporkannya ke *Cyber Crime* Polri, Divisi Humas Polri, Badan Siber Nasional, dan Kemkominfo.

Amsal 3:21-22 memperingatkan setiap orang untuk berlaku bijaksana: *Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu, dan perhiasan bagi lehermu.* Teks ini mengingatkan kita agar menguji segala sesuatu. Orang yang memiliki pertimbangan akal-sehat akan menelusuri dan memverifikasi informasi yang diterimanya. Ia tidak mudah terseret, sebaliknya, ia dapat menetapkan pilihan untuk meneruskan atau tidak berita tersebut. Inilah golongan orang-orang yang *cerdas berpikir, bijak bermedia*.

Perilaku etis dalam menegakkan demokrasi bermedia juga mencegah diri sendiri agar tidak terbenam dalam situasi *post-truth* (pasca kebenaran). Pasca kebenaran menunjuk kepada

keadaan di mana fakta-fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik ketimbang emosi dan keyakinan pribadi. Kebenaran yang diterima oleh publik bukan berdasarkan fakta maupun pertimbangan nalar rasional, bahkan kebenaran merupakan sesuatu yang cukup disepakati secara kolektif saja kendati bertentangan dengan realitas. *Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik* (1 Tesalonika 5: 21).

Sebagai warganet, kita dapat kita dapat memanfaatkan media yang telah terverifikasi untuk mengakses sebanyak mungkin informasi dan berita tentang rekam jejak paslon dan ikut berkampanye di media sosial dengan bijak. Kita juga dipanggil menjadi warga yang sadar hukum dan giat mencegah penyebarluasan hoaks dengan melaporkannya ke pihak yang berwajib.

MENERIMA WALAU TIDAK SETUJU

Pilkada dan Pemilu adalah demokrasi dengan kemenangan suara terbanyak. Paslon mana pun berpeluang sama untuk memenangkan suara. Di antara paslon-paslon, mesti ada satu yang terpilih sebagai pemenang, sementara yang lainnya gugur dan menerima kekalahannya. Paslon yang tidak terpilih dan semua pendukungnya mesti berlapang dada terutama jika tidak didapati kecurangan dalam pemilihan. Mereka mesti bergegas mengatur barisan mendukung pemimpin yang terpilih. Semangat persatuan sertakepentingan bangsa dan negara mesti tetap menjadi pedoman etis dalam menerima kekalahan dan mengakui kemenangan dalam Pilkada atau Pemilu. Menurut hemat kami, ini mudah terjadi apabila paslon

yang tidak terpilih tidak terlalu banyak menghabiskan sumber daya selama masa kampanye. Logikanya, ia tidak terlalu bersusah hati karena kekalahan jika tidak terikat pada “utang” yang teramat besar. Seorang negarawan sejati selayaknya berlapang dada terhadap suara mayoritas. Ia hanya perlu memperbaiki diri dan menjadi “*watch dog*” jalannya roda pemerintahan. *“Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”* (Yeremia 29:7). Teks ini berbicara kepada orang-orang Israel yang berada di pembuangan Babel. Pembuangan merupakan kenyataan terpahit bagi orang Israel. Mereka tidak lagi dipimpin oleh raja mereka sendiri dan mesti tunduk pada pemerintahan asing. Tidak ada pilihan lain, mereka mesti patuh dan berpartisipasi sebagai warga kepada pemerintah baru. Bercermin dari pengalaman Israel ini, paslon yang tidak terpilih dan para pendukungnya harus mengusahakan kesejahteraan kota sebab kesejahteraan kota adalah kesejahteraan mereka juga. Kekalahan atau pembuangan bukan akhir dari segalanya. Hidup masih berlanjut karena itu, siapa pun terutama warga gereja, mesti belajar menerima kenyataan dan patuh terhadap pemerintah yang terpilih, dengan catatan sesuai dengan hukum yang berlaku.



LANGKAH-LANGKAH MENDETEKSI BERITA BOHONG ATAU PALSU:

01 Cek silang judul berita di Google dan hati-hati dengan judul provokatif. Apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi tentang berita serupa dari situs berita daring dan membandingkan isinya, apakah sama atau berbeda. Dengan demikian warganet dapat menyimpulkan berita tersebut palsu atau tidak.

02 Cermati alamat situsnya. Situs hoaks biasanya belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog sehingga informasinya bisa meragukan.

03 Periksa fakta. Media arus utama terikat kode etik jurnalistik sedangkan media hoaks tidak mempertimbangkan kode etik.

04 Cek keaslian foto dengan memanfaatkan mesin pencari Google, yakni dengan melakukan drag-and-drop ke kolom pencarian Google Images. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat diinternet sehingga bisa dibandingkan. Bila ditemukan kebohongan maka:

- (a) gunakan fitur *report status* di media sosial dan
- (b) laporkan ke Kemkominfo.

KESIMPULAN

Gereja dan politik mesti ditempatkan pada relasi dialektis. Gereja mesti meninggalkan gagasan usang tentang posisi dualistik antara gereja dan politik. Perbedaan keduanya tidak didasarkan pada esensi melainkan kulit luarnya saja. Politik selalu dipandang negatif karena bersifat duniawi sedangkan gereja dipandang positif karena bersifat rohani. Padahal, politik sama seperti gereja, juga memiliki nilai-nilai dan panggilan luhur untuk menciptakan kesetaraan, keadilan dan damai sejahtera bagi seluruh makhluk. Selain itu, gereja juga bagian dari realitas politik itu sendiri. Ia tidak dapat memisahkan atau menghindarkan diri dari politik. Gereja dan politik mesti membangun relasi dialektis yang produktif.

Warga gereja adalah juga bagian integral dari tubuh bangsa ini. Warga gereja mestinya tidak lagi berbangga dengan sebutan minoritas, warga gereja adalah warga negara yang memiliki kedudukan yang setara warga negara yang beragama lain. Karena itu, warga gereja mesti memperjuangkan haknya sebab ia bukan anak tiri yang dinomorduakan. Semua setara di hadapan hukum.

Jika demikian, warga gereja juga memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk membangun bangsa ini. Salah satu cara ialah berpartisipasi aktif dalam Pemilu. Mengapa? **Pertama**, Pemilu sudah menghabiskan terlalu banyak biaya negara. Biaya tersebut berasal dari pajak yang dibayar (juga) oleh warga gereja, artinya memakai uang yang sudah terlebih dahulu disetor pada negara. Warga mesti memanfaatkan

momen Pemilu sebagai wujud penghargaan terhadap diri sendiri. **Kedua**, Pemilu dilakukan atas nama bangsa. Keterlibatan pemilih dalam Pemilu masih dalam konteks negara, bukan pribadi, keluarga, kelompok atau suku. Warga gereja memilih juga bukan semata-mata karena dorongan pribadi, keluarga, atau suku melainkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Ketiga, proses demokrasi kita tergolong yang terbaik di antara bangsa-bangsa, termasuk jika dibandingkan dengan demokrasi Amerika. Demokrasi Amerika berdasarkan *truth and trust* (kebenaran dan kepercayaan). Karenanya, apabila demokrasi kehilangan rasa percaya dan kebenaran rakyat dampaknya sangat mengerikan. Sebaliknya, demokrasi Indonesia demokrasi yang dijiwai Pancasila.

Warga gereja bukan hanya anggota tubuh Kristus, melainkan juga anggota tubuh Republik Indonesia. Warga gereja mesti menjalankan fungsinya sesuai kapasitasnya. Hak suara tidak sepatutnya diperjualbelikan atau disia-siakan (golput). Hak suara adalah hak konstitusional dan keistimewaan yang diberikan Allah kepada setiap orang untuk berpartisipasi membangun bangsa dan negaranya. Dalam mempergunakan hak suaranya, warga gereja mesti mempertimbangkan etika hidup sebagai orang Kristen. Jika Alkitab melarang suap, tindakan itu mesti dihindari. Sebaliknya, jika Alkitab menganjurkan kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota, kita mesti terlibat aktif dalam pembangunan. Sudah saatnya warga gereja katakan TIDAK pada UANG. Warga gereja yang cerdas adalah warga gereja yang sadar dan awas terhadap politik uang. Jika politik uang terjadi selama kampanye, warga gereja mesti sigap melaporkan hal itu kepada pihak berwajib seperti Bawaslu. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan

nyata menjaga keberlangsungan demokrasi yang bermartabat.

Terkait dengan paslon, warga gereja juga tidak boleh terkecoh oleh *hoaks* atau berita palsu. Warga gereja mesti menelusuri dan mempertimbangkan integritas, kapabilitas, akuntabilitaspaslon dalam memilih. Warga gereja mesti awas terhadap politisasi SARA. Sebagai anak-anak Allah, warga gereja bertanggung jawab membawa damai termasuk dalam pemilu, tidak hanya mencegah konflik melainkan mengawasi jalannya pemilu sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Secara singkat, ia mesti melakukan beberapa langkah APIT: Awasi masa kampanye, Pilih paslon yang berkompeten, Ikuti pemerintahan paslon terpilih, dan Tagih janji-janji kampanye yang belum terealisasi.

DAFTAR ACUAN

- De Gruchy, John. 1993. Saksi bagi Kristus: Kumpulan cuplikan karya Dietrich Bonhoeffer (terj.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- De Gruchy, John. 2003. *Agama Kristen dan demokrasi*. Terj. Martin L. Sinaga. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Faith and Order. 1990. *Church and World: The Unity of the Church and the Renewal of Human Community*. Geneva: WCC.
- Ngelow, Zakaria J. *Kekristenan dan Nasionalisme: Perjumpaan umat Kristen Protestan dengan Pergerakan Nasional Indonesia, 1900-1950*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1996.
- Gutierrez, Gustavo. 1996. *Gustavo Gutierrez essential writings*, ed. James B. Nickoloff. Britain: SCM Press.
- Leimena, Johannes. 2007. Kewarganegaraan Yang Bertanggungjawab. Dalam *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati dan Politisi Berhati-nurani*. Silaen, Viktor (Ed.). Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- PGI. 2016. *Dokumen keesaan gereja*. Jakarta: PGI.
- Silaen, Viktor (Ed.). 2007. *Dr. Johannes Leimena: Negarawan Sejati dan Politisi Berhati-nurani*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Sinaga, Martin L. "Membangun suatu masyarakat sipil Indonesia: Suatu panggilan kristiani" dalam *Penuntun*. Vol.4, No.13: 55-73.
- Suseno, Magnis. 1997. *Mencari sosok demokrasi: Sebuah telaah filosofis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wibowo, Setyo A. 2018. Media dan sofisme. Ceramah, STF Driyarkara, Jakarta. 5 Februari.
- Yewangoe, Andreas. 2009. *Tidak ada penumpang gelap: Warga gereja, warga bangsa*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

SERIAL BUKU PENGAWASAN PARTISIPATIF

PEMILU DAMAI DAN DEMOKRASI BERMARTABAT :

PERSPEKTIF KRISTEN PROTESTAN

“Buku ini adalah referensi bagi para tokoh agama dalam menyampaikan materi pada masyarakat. Bawaslu berharap buku ini menjadi bahan bacaan yang dapat dipakai para tokoh agama untuk menyakinkan masyarakat bahwa semua agama mengajarkan melawan politik uang. Bahwa semua agama mengajarkan untuk tidak saling membenci sebagai bentuk politisasi SARA.

Melalui buku ini, Bawaslu mengajak tokoh agama menjadi agen untuk sosialisasi pencegahan pelanggaran Pemilu. Sebab di dalam buku ini tertuang energi penyelenggaraan Pemilu yang berisikan wawasan pencegahan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap praktik politik uang dan politisasi SARA dalam Pemilu.”

Abhan

Ketua Bawaslu



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

**BAGIAN SOSIALISASI BIRO TEKNIS
PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU**